



# EDUKASI KONSUMEN

EDISI DESEMBER 2025

[sikapiuangmu.ojk.go.id](http://sikapiuangmu.ojk.go.id)



**Kesejahteraan Keuangan:  
Membangun Optimisme Masyarakat  
melalui Edukasi Keuangan**





OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN



GENCARKAN  
Gerakan Nasional Cinta Keuangan



Pada tahun 2025, OJK telah meluncurkan tiga buku literasi keuangan yang ditujukan bagi kelompok sasaran strategis, yaitu Buku Perencanaan Keuangan Keluarga, Buku Saku Literasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan Buku Pedoman Literasi Keuangan Disabilitas, sebagai upaya memperkuat literasi keuangan yang inklusif, kontekstual, dan berkelanjutan.

Baca dan unduh  
secara gratis melalui:

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id>

## 5 Kabar Otoritas

### Rangkaian Kegiatan OJK Mengajar, Tumbuhkan Generasi Melek Finansial

- 20 Edu Perbankan  
Strategi Menabung di Bank untuk Mencapai Tujuan Keuangan
- 22 Edu Invest  
World Investor Week dan CMSE 2025, Tingkatkan Literasi dan Inklusi Investasi
- 24 Edu IKNB  
OJK Luncurkan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025-2030
- 26 Edu Syariah  
Rangkaian Kegiatan Edukasi Syariah
- 28 Edu Tech  
Bagaimana Konsumen Melindungi Diri dari Ancaman *Deepfake*?
- 32 Sosok  
Muh. Fachri, S.STP, M.Si., Direktorat Jenderal Pekerja Migran Indonesia (PMI) Komitmen KP2MI Beri Perlindungan Bagi PMI
- 34 Regulasi  
Tingkatkan Pemberdayaan UMKM, OJK Terbitkan POJK 19/2025
- 36 Bisnis Pemula  
Profesi Konten Kreator: Membangun Karier di Dunia Digital
- 38 Investasi  
Perencanaan Pensiun dengan Instrumen Investasi yang Tepat
- 40 Konsumen Bicara  
OJK Terima Lebih dari 150.000 Layanan di Penutup Tahun 2025
- 41 Telaah Produk  
Unit Link, Asuransi Jiwa, Reksa Dana Pasar Uang, Mana yang Paling Cocok?
- 43 Angka Bicara  
Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Menghadapi Perekonomian 2026
- 44 Inspirasi  
Pergadaian sebagai Alternatif Pembiayaan UMKM
- 46 Wacana  
Diskon Akhir Tahun Selalu Menguntungkan, Benarkah?
- 48 Literasi Keuanganpedia  
Buku Saku Literasi Keuangan bagi PMI dan Keluarga
- 49 Kuis Sikapi Uangmu
- 50 Silam Kini  
Hari Oeang Republik Indonesia ke-79, Rupiah Kawal Asta Cita

## 6 Sorotan Utama I

### Kunjungan Ratu Maxima selaku UNSGSA: Perkuat Kesejahteraan Keuangan Indonesia

Membawa perubahan positif, Ratu Maxima dari Belanda berkunjung ke Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan finansial masyarakat Indonesia.



## 10 Sorotan Utama II

### Peran OJK Terhadap Pekerja Migran Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan nasional, khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), melalui peluncuran Buku Saku Literasi Keuangan.

## 14 Sorotan Utama III

### OJK Dorong Penguatan Literasi Keuangan Bagi Penyandang Disabilitas

OJK terus berupaya meningkatkan literasi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen khususnya bagi masyarakat penyandang disabilitas dengan meresmikan Buku Pedoman Keuangan Disabilitas pada 8 Desember 2025. Hal ini demi mendorong kesejahteraan finansial untuk semua.



## 18 Perspektif

### OJK Sukseskan Gelaran Bulan Inklusi Keuangan 2025



## 30 Fokus Global

### Peran Indonesia di Forum Kolaborasi Internasional





## Literasi Keuangan Inklusif untuk Mendorong Kesejahteraan Masyarakat

**S**emua orang mempunyai hak kesejahteraan finansial. Prinsip inilah yang mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan literasi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen bagi masyarakat – termasuk para penyandang disabilitas. Pada 8 Desember 2025 OJK meluncurkan Buku Pedoman Keuangan Disabilitas yang dimaksudkan untuk mendorong kesejahteraan finansial untuk semua.

Peluncuran buku ini merupakan bagian dari serangkaian program dan kebijakan OJK untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas. Pada awal 2025, OJK meluncurkan Pedoman Akses Pelayanan Keuangan untuk Disabilitas Berdaya (SETARA) yang menjadi kerangka dan panduan bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk menerapkan inklusi disabilitas secara strategis dan praktis. Sebelumnya OJK telah mengeluarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023. POJK ini mengatur Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dengan mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab mendukung penyediaan layanan khusus kepada konsumen penyandang disabilitas. Dukungan ini antara lain dengan menyediakan formulir yang menggunakan huruf Braille untuk penyandang disabilitas netra, menyediakan infrastruktur layanan penunjang, seperti penyedia jalur landai, dan antrean prioritas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. POJK ini juga mewajibkan penyediaan ATM khusus penyandang disabilitas dan media informasi yang memperhatikan konsumen penyandang disabilitas.

POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat, mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan menyediakan layanan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, jika kewajiban ini tidak dijalankan, OJK akan mengenakan sanksi.

“OJK tidak akan ragu menindak bank atau lembaga keuangan yang belum memenuhi akses setara,” ujar Kiki, sapaan akrab Frederica. Ia merujuk kasus tunanetra yang sempat viral karena ditolak saat hendak membuka rekening di sebuah bank swasta.

Keseriusan komitmen OJK untuk menjalankan program peningkatan literasi keuangan inklusif ini tercermin dari banyaknya program edukasi yang diselenggarakan selama tahun 2025. OJK telah melakukan 87 kali program edukasi keuangan yang diikuti 64.358 peserta. Pada periode yang sama, melalui program GENCARKAN, OJK juga telah melakukan 35.114 kegiatan yang diikuti 3.311.899 peserta. Lewat 39 kantornya di seluruh Indonesia OJK menjalankan program literasi dan inklusi bagi penyandang disabilitas di daerah masing-masing. Melalui literasi keuangan kepada seluruh masyarakat ini, OJK menjalankan komitmennya untuk mendorong kesejahteraan finansial untuk semua lapisan masyarakat.

### SUSUNAN REDAKSI

#### DEWAN PELINDUNG:

Mahendra Siregar  
(Ketua Dewan Komisiner OJK)

#### DEWAN PENASIHAT:

Friderica Widyasari Dewi (Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen),  
Rizal Ramadhani (Deputi Komisiner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen)

#### PEMIMPIN UMUM /PEMIMPIN REDAKSI:

Mohammad Ismail Riyadi (Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi),  
Rudy Agus P. Raharjo (Kepala Departemen Pelindungan Konsumen)

#### REDAKTUR AHLI:

Cecep Setiawan (Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan),  
Sekar Putih Djarot (Kepala Grup Komunikasi Publik), Rony Ukurta Barus (Direktur Inklusi Keuangan),  
Rakyan Gilar Gifarulla (Deputi Direktur Grup Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah), Sabar Wahyono (Direktur Pelayanan Konsumen, Pemeriksaan Pengaduan dan EPK Regional), Tri Herdianto (Direktur Pembelaan Hukum Pelindungan Konsumen), Rela Ginting (Direktur Penelitian Kebijakan dan Pengaturan EPK)

#### REDAKTUR:

Cecep Setiawan (Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan)

#### REDAKSI:

Anggota Tim Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan

#### ALAMAT REDAKSI:

Bidang Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK  
Jl. Lap. Banteng Timur No. 2-4,  
Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar,  
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta 10710  
Telepon: (021) 29600000  
Faksimili: (021) 3866032  
Website: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

Majalah Edukasi Konsumen dapat diunduh pada *minisite* OJK: [sikapiuangmu.ojk.go.id](http://sikapiuangmu.ojk.go.id)

# Rangkaian Kegiatan OJK Mengajar, Tumbuhkan Generasi Melek Finansial

**Wujudkan generasi yang melek finansial, OJK gelar sejumlah kegiatan di beberapa universitas, sekolah, dan komunitas dalam rangka menggalakkan program OJK Mengajar. Mengangkat tema-tema mengenai sektor jasa keuangan, OJK hadirkan pembicara yang kompeten di bidangnya.**

**O**JK Mengajar adalah program edukasi keuangan dari OJK untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, terutama generasi muda. Kegiatan ini menghadirkan pembicara dari OJK untuk memberikan kuliah umum, seminar, atau diskusi di kampus-kampus atau komunitas, membahas topik seputar sektor jasa keuangan, stabilitas sistem keuangan, dan peran OJK dalam perekonomian nasional. Program ini merupakan bagian dari rangkaian acara HUT OJK yang digelar setiap tahun dan bertujuan membangun pemahaman menyeluruh tentang ekosistem keuangan untuk mendorong inovasi dan perencanaan keuangan yang lebih baik.

Tahun ini, rangkaian kegiatan OJK Mengajar dilaksanakan dalam rangka HUT OJK ke-14. Kota-kota yang disinggahi antara lain Aceh di Universitas Syiah Kuala (3 Oktober), Purwokerto di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (7 Oktober), Jember di Universitas

Jember (14 Oktober), Kediri di Universitas Islam Kediri (17 Oktober), Yogyakarta di SMAN 3 (21 Oktober), Lampung di Universitas Lampung (24 Oktober), Surabaya di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (8 November), Bengkulu di Universitas Bengkulu (11 November), dan NTT di GMT Jemaat Yeruel Seba (14 November).

Selain meningkatkan literasi dan edukasi keuangan di kalangan mahasiswa dan masyarakat, program OJK Mengajar juga bertujuan untuk mendorong pemahaman mengenai stabilitas keuangan dan pengelolaan keuangan yang cerdas, menanamkan nilai integritas dan mencegah korupsi sejak dini, serta melakukan sosialisasi dan edukasi peran sektor jasa keuangan.

Hadir sebagai pembicara di masing-masing kota antara lain Wakil Ketua Dewan Komisiner, Mirza

Adityaswara (di Bengkulu); Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi (di Aceh dan Jember); Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, Ogi Prastomiyono (di Purwokerto); Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML), Agusman (di Kediri); Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, Friderica Widayarsi Dewi (di Yogyakarta); Ketua Dewan Audit, Sophia Wattimena (di Lampung); Anggota Dewan Komisiner, Juda Agung (di Surabaya); dan Asisten Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis Provinsi NTT, Polantoro (di NTT).





# Kunjungan Ratu Maxima selaku UNSGSA: Perkuat Kesejahteraan Keuangan Indonesia

Membawa perubahan positif, Ratu Maxima dari Belanda berkunjung ke Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan finansial masyarakat Indonesia.

**R**atu Máxima dari Belanda, sebagai Advokat Khusus PBB untuk Kesejahteraan Finansial (UNSGSA), November 2025 lalu mengunjungi Indonesia. Bekerja sama dengan OJK, Ratu Maxima meluncurkan program “*Financial Health*” nasional untuk mendorong masyarakat tidak hanya punya akses layanan keuangan (inklusi), tapi juga mengelolanya

secara sehat, termasuk perencanaan jangka panjang, dana darurat, dan perlindungan dari pinjaman *online* (pinjol) berisiko, demi kesejahteraan ekonomi rumah tangga dan nasional.

### Kunjungan Ratu Maxima

Kedatangan Ratu Maxima sebagai tamu kenegaraan Republik Indonesia menandai dimulainya rangkaian agenda kerja bersama OJK serta sejumlah Kementerian dan Lembaga dalam upaya memperkuat program kesejahteraan finansial, meningkatkan perlindungan konsumen, serta memperdalam kolaborasi penanganan *fraud* dan *scam* di Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa agenda global yang diusung Ratu Maxima selaras dengan prioritas nasional OJK dalam memperkuat literasi keuangan, inklusi, dan kesejahteraan finansial.

Friderica menjelaskan bahwa kesejahteraan finansial merupakan konsep lanjutan yang menekankan kemampuan masyarakat merencanakan kebutuhan keuangan secara berkelanjutan. “Keputusan khusus untuk kesejahteraan finansial, ini terminologi yang agak sedikit baru, karena sebelumnya itu yang selalu digaungkan adalah *financial literacy* dan *financial inclusion*,” kata Friderica.

Ratu Maxima melakukan kunjungan kerja di Indonesia pada 24-27 November 2025 dengan fokus utama kesejahteraan finansial. Indonesia terpilih menjadi negara kedua dalam kunjungan Ratu Maxima yang kapasitasnya sebagai perwakilan UNSGSA. Dalam kunjungan ini, Ratu Maxima akan mengunjungi beberapa institusi dan lembaga sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan finansial di masyarakat, terkhusus Indonesia.

Agenda kerja bersama OJK yang akan dijalankan mencakup *Fraud & Scam Focus Group Discussion*, *Ministerial Group Meeting*, *National*

*Financial Health Event*, serta pertemuan bilateral antara Ratu Maxima dan Dewan Komisiner OJK. OJK menyampaikan apresiasi atas dukungan Ratu Maxima terhadap berbagai inisiatif untuk meningkatkan inklusi dan kesejahteraan finansial masyarakat Indonesia, serta siap memperkuat kerja sama dalam mendorong ekosistem keuangan yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

### Agenda Strategis OJK dan UNSGSA

Program *financial health* diposisikan sebagai kelanjutan dari agenda literasi dan inklusi keuangan nasional, dengan tujuan menghadirkan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat, mulai dari pengelolaan keuangan harian hingga ketahanan menghadapi risiko ekonomi. Ketua Dewan Komisiner OJK, Mahendra Siregar mengatakan pendekatan kesejahteraan keuangan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional yang menekankan pengelolaan keuangan secara bertanggung jawab, perlindungan dari guncangan ekonomi, dan perencanaan masa depan yang berkelanjutan.

Dalam pengembangan kesejahteraan finansial, Ratu Maxima

menjelaskan tiga hal yaitu **pertama** mengubah cara pandang bahwa literasi keuangan bukan sekadar pemahaman produk, tetapi harus mengarah pada kesejahteraan finansial sehingga produk keuangan harus sesuai kebutuhan masyarakat.

**Kedua**, mengembangkan produk keuangan yang tidak membahayakan konsumen sehingga dibutuhkan inovasi dalam peningkatan perlindungan konsumen. **Ketiga**, mengarahkan pemahaman bersama khususnya para pelaku usaha jasa keuangan bahwa kesejahteraan finansial bukanlah kegiatan CSR, melainkan bagian penting dalam model bisnis jangka panjang. Ketiganya menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem layanan keuangan yang mendukung masyarakat dalam mengelola risiko dan membangun masa depan yang lebih stabil.

Ratu Maxima juga memperkenalkan konsep kesejahteraan keuangan yang mencakup empat pilar, yakni:

#### 1. Kemampuan mengelola keuangan sehari-hari.

Untuk mencapai kesejahteraan finansial, pelayanan jasa keuangan perlu membantu masyarakat







menyiapkan kebutuhan sehari-hari. Misalnya, menyelenggarakan program tertentu untuk membahas kebutuhan sekolah, *budgeting* atau perencanaan anggaran.

## 2. Ketahanan terhadap guncangan finansial.

Selanjutnya, pelayanan jasa keuangan juga harus bisa memastikan masyarakat siap untuk menghadapi guncangan finansial atau situasi finansial yang tidak terduga. Seperti adanya PHK atau pandemi.

## 3. Kesiapan dan perencanaan masa depan.

Setelah memahami perencanaan anggaran dan memiliki tabungan atau asuransi, masyarakat harus mempersiapkan masa depan. Edukasi terkait investasi perlu dilakukan agar masyarakat memiliki aset jangka panjang sehingga finansialnya sejahtera di masa depan.

## 4. Rasa percaya diri dalam kondisi keuangan pribadi.

Ketika pilar-pilar sebelumnya telah terpenuhi, masyarakat bisa merasa percaya diri tentang masa depan.

Ratu Maxima menilai banyak negara, termasuk Indonesia, selama ini lebih menekankan akses layanan keuangan tanpa memperhatikan aspek daya tahan dan perencanaan finansial masyarakat. "Memiliki rekening saja tidak cukup untuk hidup lebih baik. Yang utama adalah kesejahteraan keuangan," ujar Ratu Maxima.

Sebagai perbandingan, ia menyebutkan bahwa sekitar 22% masyarakat Belanda belum memiliki kondisi keuangan yang sehat, sementara di Amerika Serikat hanya 41% populasi yang dianggap stabil secara finansial. Karena itu, keuangan sehat merupakan isu global. UNSGSA juga mendorong perbaikan metode pengukuran kesejahteraan keuangan serta fokus pada langkah nyata untuk meningkatkan kualitas finansial rumah tangga di Indonesia.

## Peran Ratu Maxima dalam Program Kesejahteraan Keuangan UNSGSA

Pada tanggal 25 September 2024, Ratu Máxima dari Belanda diangkat sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesejahteraan Keuangan oleh Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres. Posisi baru ini

merupakan evolusi dari pekerjaannya sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Keuangan Inklusif untuk Pembangunan, sebuah peran yang diembannya selama 15 tahun ini.

Ketika Ratu Máxima menjadi Kelompok Penasihat PBB untuk Sektor Keuangan Inklusif periode 2006-2009, kurang dari separuh penduduk dunia yang telah mencapai usia dewasa telah memiliki akses ke sistem keuangan formal, yang diukur berdasarkan akses ke rekening keuangan dasar. Kebanyakan dari mereka adalah kelompok-kelompok yang secara tradisional kurang terlayani seperti perempuan, petani kecil, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki akses paling terbatas.

Sebagai Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesejahteraan Finansial, Ratu Máxima telah mengunjungi lebih dari 48 negara. Awal peran Ratu Máxima memperjuangkan akses dan penggunaan layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan berkualitas, termasuk rekening keuangan, pinjaman, produk tabungan, dan asuransi, menemukan banyak fakta. Yakni layanan keuangan formal yang sulit dijangkau masyarakat kelas bawah serta pemahaman mereka tentang keuangan yang terbatas.

Setelah 15 tahun berjuang, kini upaya program ini telah terjadi kemajuan yang luar biasa. Hampir 80% orang dewasa di seluruh dunia kini memiliki akses ke setidaknya satu rekening keuangan (data Global Findex 2021). Pada tahun 2015, inklusi keuangan diidentifikasi sebagai pendorong utama tujuh dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) PBB. Kesenjangan gender dalam kepemilikan rekening antara pria dan wanita di negara berkembang telah menyempit dari 9% menjadi 6%, dan lebih dari 60 negara telah menerapkan strategi inklusi keuangan nasional.

Badan-badan penetapan standar sektor keuangan global telah memasukkan inklusi keuangan dalam program kerja mereka termasuk



Indonesia melalui OJK. Membangun pengaturan koordinasi yang lebih baik dengan komunitas inklusi keuangan. Bank sentral, otoritas pengatur, dan pembuat kebijakan telah menjadikan inklusi keuangan sebagai fokus strategis, sementara penyedia layanan keuangan telah memprioritaskan kebijakan dan layanan yang mempromosikannya.

Bagi UNSGSA, programnya bukan sekedar mengedukasi masyarakat agar memahami cara membuka rekening bank, melainkan masyarakat dapat memahami sistem layanan keuangan agar bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan akses ke layanan keuangan yang telah diperluas secara signifikan dan jaringan mitra global yang kuat yang mendukung inklusi keuangan, UNSGSA kini akan fokus pada kesejahteraan keuangan.

“Di dunia yang penuh ketidakpastian ekonomi, konflik, dan perubahan iklim, layanan keuangan sangat penting untuk membantu masyarakat mengendalikan hidup dan masa depan mereka. Sebagai Advokat Khusus untuk Kesejahteraan Keuangan, Ratu Máxima melanjutkan pekerjaannya yang penting untuk

memastikan bahwa sistem keuangan dapat mendukung impian, harapan, dan aspirasi masyarakat di seluruh dunia”, ujar Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres.

### **Apa itu Kesejahteraan Finansial?**

Sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesejahteraan Keuangan, Ratu Máxima berupaya memberdayakan masyarakat dengan produk dan alat keuangan yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola keuangan sehari-hari, membangun ketahanan terhadap krisis keuangan, merencanakan keuangan masa depan, dan merasa percaya diri tentang kehidupan keuangannya. Inilah yang disebut sebagai “kesejahteraan keuangan”.

Pendekatan kesejahteraan keuangan berfokus pada peningkatan hasil dengan memberikan solusi yang berpusat pada masyarakat, mendorong ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan yang mendukung stabilitas keuangan, ketahanan, dan kemakmuran jangka panjang bagi semua orang.

Pentingnya kesejahteraan keuangan menjadi sangat jelas selama krisis

keuangan dan ekonomi seperti inflasi dan pandemi COVID-19, termasuk krisis terkait iklim yang lebih sering terjadi, seperti kekeringan atau banjir. Kondisi tersebut ternyata juga mengungkap bahwa masyarakat ternyata sulit mengakses sistem keuangan sehingga dampaknya cukup fatal yakni kesulitan meraih peluang ekonomi baru.

Oleh karena itu, Ratu Máxima memperjuangkannya di tingkat global termasuk Indonesia untuk pengembangan layanan, produk, dan kebijakan keuangan yang menjadikan kesejahteraan keuangan sebagai tujuan utama. Layanan ini harus selaras dengan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat dapat melindungi diri dari risiko keuangan dan berinvestasi untuk masa depan yang lebih baik.

Melalui peran strategis dan berkelanjutan Ratu Maxima, UNSGSA mendorong kerja sama dan komitmen dari para pemimpin politik, regulator, badan penetapan standar global, masyarakat sipil, sektor swasta, dan yang terpenting, kelompok-kelompok yang kurang mendapat akses keuangan, untuk membangun masa depan yang lebih aman dan tangguh.





## **Kolaborasi OJK Dorong Pekerja Migran Indonesia Cerdas Finansial**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan nasional, khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), melalui peluncuran Buku Saku Literasi Keuangan.



**O**JK bekerja sama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dan Bank Indonesia (BI) meluncurkan Buku Saku Literasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) bertema “PMI Cerdas Finansial, Menuju Indonesia Maju”. Inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya OJK memperkuat literasi keuangan para pahlawan devisa ini. PMI merupakan salah satu segmen prioritas dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025.

Peluncuran buku ini digelar di Jakarta pada 10 November 2025 bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Buku saku ini berisi panduan praktis bagi para PMI dan keluarganya untuk memahami cara mengelola keuangan secara bijak, aman, dan berkelanjutan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen

OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa PMI memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional. “Kami memilih Hari Pahlawan karena para pekerja migran adalah pahlawan devisa. Mereka berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan keluarga, baik di daerah asal maupun di negara tempat bekerja,” ujar Friderica.

Friderica menjelaskan, besarnya potensi ekonomi dari PMI menjadi peluang untuk memperkuat inklusi keuangan nasional. Berdasarkan data KP2MI dan Bank Indonesia, pada 2024 nilai remitansi yang dikirim PMI ke Indonesia mencapai Rp251–263 triliun, atau sekitar 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Rata-rata setiap PMI mengirimkan sekitar Rp64 juta per tahun kepada keluarganya di tanah air.

Peluncuran buku saku ini merupakan langkah konkret OJK untuk meningkatkan kemampuan

finansial PMI di era digital. “PMI yang cerdas finansial akan lebih sejahtera dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional,” kata Friderica menambahkan.

Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI, Mukhtarudin, mengapresiasi sinergi lintas lembaga dalam penyusunan buku saku tersebut. “Buku ini menjadi panduan bagi pekerja migran agar lebih bijak mengelola keuangan. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan literasi sekaligus pelindungan bagi PMI,” ujar Mukhtarudin.

Ia juga mengingatkan para PMI agar berhati-hati menjaga data pribadi dan tidak mudah membagikan informasi rekening bank kepada pihak lain. “Kita ingin memastikan pekerja migran tidak hanya pulang selamat, tapi juga pulang sukses,” tambah Mukhtarudin. Ia menjelaskan sekitar 70% gaji pekerja migran





masih digunakan untuk konsumsi. Melalui buku saku ini, para pekerja diharapkan dapat belajar mengelola keuangan secara bijak, berinvestasi dengan aman, dan mempersiapkan masa depan setelah kembali ke tanah air.

Sependapat, Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen BI, Anton Daryono, turut mengingatkan agar pekerja migran senantiasa melindungi data pribadi mereka, terutama di media sosial. “Simpan dan lindungi data pribadi, jadi tolong agar bijak dalam bermedia sosial,” ujarnya.

Anton menambahkan peluncuran buku ini menjadi bagian dari komitmen BI dalam menjaga sistem keuangan yang aman dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pekerja migran. “Untuk itu, BI berkomitmen menjaga tiga pilar utama; lindungi, edukasi, dan kolaborasi. Kami memastikan setiap rupiah hasil kerja keras PMI sampai dengan aman, data pribadinya terlindungi, dan seluruh layanan keuangan transparan serta responsif,” katanya

Peluncuran tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, serta perwakilan pelaku usaha jasa keuangan dan PMI.

Peluncuran buku ini menjadi wujud sinergi KP2MI, OJK, dan Bank Indonesia dalam menyediakan panduan praktis bagi pekerja migran. Disusun dengan bahasa sederhana, buku ini sebagai panduan praktis dan aplikatif yang dapat membantu para PMI dalam memahami prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan, seperti perencanaan keuangan, menabung, remitansi, investasi yang baik, serta mengenali

risiko penipuan atau penyalahgunaan layanan keuangan.

Lebih dari sekadar alat bantu teknis, buku ini dapat menjadi media pemberdayaan—memberikan rasa percaya diri kepada para PMI untuk mengambil keputusan keuangan secara mandiri dan baik, serta menjadi konsumen keuangan yang cerdas dan terlindungi. Dengan penguasaan literasi keuangan, PMI tidak hanya sukses dalam bekerja, tetapi juga mampu menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan bagi keluarganya.

OJK bersama KP2MI dan Bank Indonesia berkomitmen memperluas edukasi keuangan ke berbagai daerah kantong pekerja migran seperti Jawa Barat, Jawa

“

Kami memilih Hari Pahlawan karena para pekerja migran adalah pahlawan devisa. Mereka berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan keluarga, baik di daerah asal maupun di negara tempat bekerja.

”



Timur, Jawa Tengah, NTB, Lampung, dan Bali. Program ini juga akan diintegrasikan dalam kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) agar setiap calon PMI memperoleh bekal literasi keuangan sebelum bekerja di luar negeri.

Selain meningkatkan literasi keuangan, inisiatif ini juga diharapkan dapat mengurangi potensi kerentanan finansial di kalangan PMI dan keluarganya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan uang, pekerja migran diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelumnya pun OJK telah bersinergi dengan BI dan KP2MI dalam Perayaan Hari Kartini bertema “Perempuan Berdaya dan Cerdas Finansial Menyongsong Masa Depan Sejahtera”. Kegiatan Edukasi Keuangan bagi perempuan Pekerja Migran Indonesia ini diikuti oleh sekitar 1.000 PMI.

Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Dhanapala Kementerian

Keuangan RI Jakarta ini dihadiri Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, dan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti. Acara digelar untuk meningkatkan literasi keuangan bagi kaum perempuan khususnya bagi para perempuan pekerja migran dari Indonesia agar pandai dalam melakukan pengelolaan keuangan dan terhindar dari berbagai tawaran kejahatan atau penipuan keuangan.

OJK menegaskan, pemberdayaan PMI bukan hanya tentang pelindungan, tetapi juga mendorong kemandirian finansial sebagai bekal membangun masa depan yang lebih sejahtera.

“

Buku ini menjadi panduan bagi pekerja migran agar lebih bijak mengelola keuangan. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan literasi sekaligus pelindungan bagi PMI

”





## OJK Dorong Penguatan Literasi Keuangan Bagi Penyandang Disabilitas

OJK terus berupaya meningkatkan literasi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen khususnya bagi masyarakat penyandang disabilitas dengan meresmikan Buku Pedoman Keuangan Disabilitas pada 8 Desember 2025. Hal ini demi mendorong kesejahteraan finansial untuk semua.



**P**enyandang disabilitas merupakan segmen yang perlu didukung agar mendapat kesempatan yang setara dan tidak tertinggal. Untuk itu, OJK berkomitmen memberdayakan penyandang disabilitas melalui literasi, inklusi, dan perlindungan konsumen yang komprehensif.

OJK pun telah melakukan berbagai program dan kebijakan dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas. Pada awal tahun 2025, OJK telah meluncurkan Pedoman Akses Pelayanan Keuangan untuk Disabilitas Berdaya (SETARA) yang menjadi kerangka dan panduan bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk menerapkan inklusi disabilitas secara strategis dan praktis. Selain itu, OJK juga telah mengeluarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Melalui POJK ini, pelaku usaha jasa keuangan mempunyai tanggung jawab untuk mendukung penyediaan layanan khusus kepada konsumen penyandang disabilitas. Dukungan dimaksud seperti memberikan formulir yang menggunakan huruf braille khusus penyandang disabilitas netra, menyediakan infrastruktur layanan yang menunjang, seperti jalur landai, dan antrean prioritas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. PUJK juga diwajibkan menyediakan ATM khusus penyandang disabilitas dan menyediakan media informasi yang memperhatikan konsumen penyandang disabilitas.

OJK juga telah mengeluarkan POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat. Melalui POJK dimaksud PUJK juga diwajibkan untuk menyediakan sarana dan prasarana terkait literasi dan inklusi

keuangan kepada konsumen dan masyarakat penyandang disabilitas.

OJK menegaskan pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan layanan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dan siap menjatuhkan sanksi jika kewajiban itu diabaikan. “Pelaku usaha jasa keuangan mempunyai tanggung jawab untuk mendukung penyediaan layanan khusus kepada konsumen penyandang disabilitas,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi.

OJK, kata Friderica, tidak akan ragu menindak bank atau lembaga keuangan yang belum memenuhi akses setara. Ia mencontohkan kasus tunanetra yang sempat viral karena ditolak saat hendak membuka rekening di sebuah bank swasta. Friderica menekankan, program OJK bukan berhenti pada peringatan tahunan. Ia menyebut OJK memiliki 38 kantor di seluruh Indonesia yang diwajibkan menjalankan program literasi dan inklusi bagi penyandang disabilitas di daerah masing-masing.

Sebagai bagian dari upaya OJK untuk meningkatkan literasi keuangan penyandang disabilitas, sejak 2024 s.d. 2025, OJK telah melakukan 192 kali program edukasi keuangan yang diikuti 68.319 peserta. Selain itu, pada periode yang sama, melalui program GENCARKAN, OJK juga telah melakukan 100 kegiatan yang diikuti 9.410 peserta.

Pada 8 Desember 2025 OJK meresmikan penerbitan buku pedoman literasi keuangan bagi penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan OJK untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional 2025 sekaligus sebagai upaya pemberdayaan disabilitas dengan pedoman yang setara.

Peluncuran Buku Pedoman Literasi Keuangan Bagi Penyandang Disabilitas mengangkat tema “Disabilitas Cerdas

dan Sehat Finansial Menuju Indonesia Emas 2045”. Buku ini merupakan hasil kolaborasi OJK dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia.

Buku ini diharapkan dapat membantu penyandang disabilitas memahami prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan, seperti menabung, investasi dengan bijak, memiliki produk proteksi, serta mengenali risiko penipuan atau kejahatan di sektor jasa keuangan. Untuk pengembangan lebih lanjut, pedoman ini akan tersedia dalam berbagai format ramah disabilitas

“

**Pelaku usaha  
jasa keuangan  
mempunyai  
tanggung jawab  
untuk mendukung  
penyediaan  
layanan khusus  
kepada konsumen  
penyandang  
disabilitas**

”



seperti braille, *audio book*, dan format lainnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam sambutannya yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI Supomo menyambut baik program dan kebijakan OJK dalam rangka meningkatkan literasi, inklusi keuangan dan perlindungan konsumen kepada penyandang disabilitas. Kemensos juga berkomitmen untuk senantiasa berkolaborasi dan bersinergi dalam rangka memberdayakan penyandang disabilitas.

“Buku pedoman literasi keuangan bagi penyandang disabilitas yang diluncurkan pada hari ini diharapkan mampu mengenalkan hak-hak keuangan penyandang disabilitas, seperti hak memiliki rekening,

mendapatkan layanan mudah diakses, dan dihormati dalam transaksi keuangan,” kata Supomo.

Selanjutnya, buku dimaksud juga dapat memberi panduan sederhana tentang pengelolaan uang dan bantuan sosial, membedakan kebutuhan dan keinginan, menabung, bahkan memungkinkan penyandang disabilitas untuk mulai berinvestasi secara aman. Selain itu, materi di buku tersebut dapat menjadi ‘tameng’ dalam menghadapi berbagai modus kejahatan di sektor jasa keuangan.

Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) Republik Indonesia Dante Rigmalia menyampaikan apresiasi kepada OJK yang telah meluncurkan buku pedoman literasi keuangan bagi penyandang disabilitas. Hal ini menjadi bagian dari peran OJK

dalam memenuhi mandat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Salah satu mandatnya adalah penyandang disabilitas memiliki kesetaraan dalam hal mengakses layanan jasa keuangan dengan menyesuaikan kondisi kedisabilitasan.

“OJK telah memberikan pemberdayaan kepada penyandang disabilitas bukan berupa *charity* (belas kasihan). Pemberdayaan yang dilakukan OJK dalam bentuk pengembangan dan peningkatan literasi keuangan penyandang disabilitas di seluruh wilayah Indonesia, tentu hal ini sangat bermanfaat bagi rekan-rekan penyandang disabilitas,” kata Dante Rigmalia.

Kegiatan ini dihadiri oleh 500 peserta yang terdiri dari 300



penyandang disabilitas dan 200 pendamping.

Selanjutnya, dilakukan pula kegiatan edukasi keuangan bagi penyandang disabilitas. Hadir sebagai narasumber Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Ismail Riyadi, Komisioner Komisi Nasional Disabilitas RI Jonna Aman Damanik, dan Perencana Ahli Muda Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas Dewi Rahayuningsih. Hadir pula CEO & Founder Koneksi Indonesia Inklusif Martella Rivera Sirait dan Ketua II Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Bidang Advokasi dan Peningkatan Kesadaran Rina Prasarani.

Materi yang dipaparkan narasumber mencakup pentingnya literasi keuangan bagi penyandang

disabilitas, cerdas dan melek finansial, penguatan partisipasi dan advokasi disabilitas dalam pembangunan ekonomi nasional, serta kebijakan dan *roadmap* nasional untuk mendorong akses keuangan dan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Selain itu, disampaikan pula materi tentang mewujudkan ekonomi inklusif melalui pemberdayaan penyandang disabilitas dan akses kerja yang ramah, serta pemberdayaan ekonomi dan kepemimpinan penyandang disabilitas perempuan dalam menghadapi diskriminasi berlapis.

“

Buku pedoman literasi keuangan bagi penyandang disabilitas yang diluncurkan pada hari ini diharapkan mampu mengenalkan hak-hak keuangan penyandang disabilitas, seperti hak memiliki rekening, mendapatkan layanan mudah diakses, dan dihormati dalam transaksi keuangan

”





## OJK Sukseskan Gelaran Bulan Inklusi Keuangan 2025

Diadakan setiap tahun, Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 kembali digelar. Melalui BIK, OJK wujudkan komitmennya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

Akses keuangan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan memiliki peran penting dalam meningkatkan hidup masyarakat. Salah satu pemenuhan kebutuhan produk dan layanan keuangan dari level yang paling mendasar yaitu melalui kepemilikan rekening di bank yang kemudian dapat berkembang untuk memiliki produk dan layanan keuangan lainnya seperti asuransi, pembiayaan, program pensiun, dan investasi.

Dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan yang signifikan dan berkelanjutan, OJK bersama Kementerian/Lembaga, Industri Jasa Keuangan, dan *stakeholders* terkait secara serentak di seluruh wilayah Indonesia menggelar Bulan Inklusi Keuangan (BIK) setiap bulan Oktober.



Pada Bulan Inklusi Keuangan tahun ini dilaksanakan berbagai program seperti edukasi dan sosialisasi terkait inklusi keuangan serta berbagai penjualan produk/jasa keuangan berinsentif seperti diskon, bonus, *reward*, *cashback* dan promo khusus di bulan Oktober. Digelar juga pameran produk keuangan; program khusus seperti pembukaan rekening dan akses pembiayaan serta kegiatan lainnya yang melibatkan sektor jasa keuangan seperti *fintech*, permodalan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan dan lembaga lainnya.

Sejak digagas pertama kali pada pertengahan 2000-an, lalu mulai resmi dilaksanakan pada 2016, BIK memang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya akses layanan keuangan yang merata dan inklusif. Sekaligus mendorong partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan produk keuangan seperti tabungan, asuransi, investasi, dan pembiayaan.

“Sektor jasa keuangan memiliki potensi yang mampu melipatgandakan perekonomian, bahkan dapat menjadi beberapa kali lebih besar dari PDRB daerah apabila literasi dan inklusi masyarakat terus meningkat,” kata Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar saat membuka puncak rangkaian acara BIK 2025 di Surabaya.

Mengusung tema “Inklusi Keuangan untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” acara puncak BIK 2025 dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Friderica menyampaikan tiga pesan penting yaitu edukasi keuangan yang

tepat sasaran, inklusi keuangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta sinergi serta kolaborasi yang harus terus diperkuat, terutama bersama pemerintah daerah yang telah menjadi mitra strategis dalam berbagai program OJK.

Sebagai puncak kegiatan sekaligus menutup BIK 2025, OJK menggelar Financial Expo (FinExpo) 2025 pada 23–26 Oktober 2025 di Tunjungan Plaza 1, 2, 3, dan 6 Surabaya. FinExpo menjadi wujud kolaborasi antara Kementerian/Lembaga, PUJK, asosiasi, dan UMKM, dalam memberikan edukasi, konsultasi, serta layanan keuangan langsung kepada masyarakat.

Sebelumnya, pembukaan rangkaian kegiatan BIK telah digelar dengan kegiatan “Road to BIK” sejak September-Oktober 2025 yang diikuti oleh Kantor OJK Daerah, regulator, kementerian/lembaga, pemerintah

daerah, dan PUJK di seluruh Indonesia.

Selama periode BIK 2025, tercatat 5.182 kegiatan literasi dan inklusi keuangan terlaksana di seluruh Indonesia dengan 10 juta lebih keterlibatan peserta. Sementara itu, akses keuangan baru yang berhasil terbuka mencapai 3,55 juta rekening perbankan; 1,47 juta rekening pinjaman perusahaan pembiayaan; 720 ribu akun *fintech*; 951 ribu polis asuransi; 643 ribu rekening pasar modal; dan 5,01 juta rekening pergadaian.

Kegiatan BIK 2025 telah berhasil menjangkau 180 Desa Tertinggal yang tersebar di 73 Kabupaten/Kota di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T). Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat seluruh pihak dalam memperluas jangkauan layanan keuangan formal serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan.





# Strategi Menabung di Bank untuk Mencapai Tujuan Keuangan

Menabung sering dianggap sederhana, tetapi perannya sangat penting untuk kestabilan finansial. Dulu, menabung identik dengan celengan atau menyimpan di bawah kasur. Namun, di era perbankan modern, pilihan menabung semakin beragam. Anda dapat memanfaatkan fitur kantong, deposito, dan tabungan berjangka untuk mencapai tujuan keuangan.

**M**engatur keuangan wajib hukumnya jika ingin memiliki keuangan yang sehat apalagi dengan tujuan untuk mencapai kebebasan finansial. Persiapan yang harus dilakukan memang tidak sebentar, sebab butuh perencanaan yang matang dalam mencapai kebebasan finansial ini. Perencanaannya bisa dimulai dengan



hal yang sederhana, yakni menabung di bank. Manfaatkan fitur kantong yang dimiliki bank, deposito, dan tabungan jangka panjang.

Saat ini, tersedia berbagai macam aplikasi mengatur keuangan. Bahkan, kini juga banyak tersedia bank digital yang menawarkan kemudahan serta memanjakan nasabahnya untuk kemudahan mengatur keuangan. Salah satu yang menjadi solusi pengelolaan finansial yang menjawab kebutuhan setiap nasabah, yakni fitur kantong. Fitur kantong ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

Pertama, nasabah dapat membuat 20 kantong nabung dan 20 kantong bayar. Kedua, setiap kantong memiliki nomor rekening masing-masing. Dengan kata lain, fitur kantong memungkinkan nasabahnya memiliki banyak rekening untuk mengelola berbagai kebutuhan, namun semuanya tetap di dalam satu akun yang sama.

Sederet kemudahan Kantong Jago ini memang dibuat untuk memanjakan pengguna dengan berbagai fitur yang disediakan. Misalnya, setiap orang bisa membuat Kantong untuk berbagai kebutuhan seperti Kantong Jajan, Kantong Tagihan Bulanan, Kantong Cicilan Rumah, Kantong Investasi, Kantong Tabungan Hari Tua, dan lainnya. Yang pasti, nasabah akan semakin mudah dalam mengatur tujuan finansial untuk kebaikan pada masa yang akan datang.

Selain itu, kantong ini bisa dimanfaatkan pebisnis pemula untuk memisahkan kebutuhan pribadi dan kebutuhan usaha di kantong berbeda. Kebutuhan usaha tersebut misalnya pembayaran gaji karyawan, pembayaran sewa kantor atau tempat usaha, juga bisa dipisahkan lagi di kantong masing-masing.

Dengan fitur kantong, uangmu bukan lagi sekadar angka, tapi

sebuah kisah. Setiap tabungan atau pengeluaran memiliki narasi dan tujuan di baliknya. Fitur kantong pada bank digital ini adalah alat personalisasi yang memungkinkan mengatur keuangan sesuai keinginan, mengubah cara pandang terhadap menabung dari sebuah kewajiban menjadi sebuah petualangan seru menuju impian.

Selain tabungan reguler, tabungan berjangka juga menjadi salah satu produk unggulan dari beberapa bank. Tabungan berjangka adalah produk simpanan bank yang memiliki jangka waktu atau tenor tertentu, di mana nasabah menyetor uang secara rutin (biasanya bulanan) dengan jumlah yang sudah disepakati di awal. Dana tersebut hanya bisa dicairkan setelah jangka waktu berakhir.

Konsepnya mirip seperti membuat “komitmen finansial” pada diri sendiri. Bank akan membantu mengunci dana agar tidak mudah diambil sebelum waktunya. Hal ini membuat tabungan berjangka cocok digunakan untuk mencapai tujuan finansial jangka menengah atau panjang, seperti menyiapkan dana pendidikan anak, persiapan pernikahan, dana untuk membeli rumah atau kendaraan, modal usaha yang direncanakan beberapa tahun ke depan, dan rencana liburan besar.

Tabungan berjangka adalah solusi tepat jika ingin menabung secara disiplin, memiliki target finansial yang jelas, dan menginginkan bunga lebih tinggi daripada tabungan biasa. Sementara itu, tabungan biasa memberikan fleksibilitas penuh untuk transaksi harian dan dana darurat. Mengombinasikan keduanya adalah strategi yang cerdas: tabungan biasa menjaga likuiditas, sedangkan tabungan berjangka mengamankan dana untuk tujuan masa depan.

Dengan begitu, kamu tidak hanya menabung, tetapi juga membangun pondasi finansial yang lebih kuat.

Menabung jangka panjang juga bisa dilakukan dengan membuka deposito. Deposito merupakan produk simpanan berjangka yang hanya dapat dicairkan pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan bank. Dana yang disimpan dalam deposito akan memperoleh bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa, namun tidak dapat ditarik sewaktu-waktu tanpa dikenakan penalti.

Deposito sering digunakan untuk tujuan investasi jangka pendek hingga menengah, serta sebagai alat untuk menjaga nilai uang dari inflasi. Deposito jangka panjang adalah simpanan berjangka yang memungkinkan nasabah untuk menyimpan uang dalam periode waktu yang lebih lama dengan imbal hasil berupa bunga tetap. Deposito ini biasanya memiliki suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan deposito jangka pendek, membuatnya menarik bagi investor yang tidak membutuhkan akses cepat ke dana mereka.

Produk ini cocok untuk individu yang ingin menyimpan dana dalam jangka waktu tertentu dan memperoleh keuntungan dari bunga tetap, tanpa perlu khawatir dengan fluktuasi pasar seperti yang terjadi pada saham atau reksa dana.

Memilih antara tabungan reguler, tabungan berjangka, dan deposito bukanlah soal mana yang lebih baik secara mutlak, melainkan soal mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan keuanganmu. Dengan memahami karakteristik masing-masing produk, kamu bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan dan mencapai tujuan finansialmu.

# World Investor Week dan CMSE 2025, Tingkatkan Literasi dan Inklusi Investasi



**D**ua even besar yang rutin diadakan setiap tahunnya tersebut merupakan rangkaian kegiatan edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat luas. Pada gelaran World Investor Week (WIW) 2025 yang digagas oleh International Organization of Securities Commissions (IOSCO), diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya edukasi dan perlindungan investor secara global.

Selama sepekan (6-12 Oktober), anggota dan pendukung IOSCO di enam benua menyelenggarakan

Berlangsung di waktu yang berdekatan, dua even besar yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan diadakan di bulan Oktober lalu, World Investor Week dan Capital Market Summit & Expo 2025.

berbagai kegiatan, seperti lokakarya, webinar (seminar daring), dan kegiatan interaktif lainnya yang berfokus pada investor. Melalui kegiatan tersebut, organisasi dari lebih dari 100 negara akan bersama-sama membahas isu-

isu terkini seputar investasi yang berdampak pada investor di seluruh dunia. Tahun ini, tiga tema utama yang diangkat adalah Teknologi dan Keuangan Digital, Kewaspadaan Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam



Layanan Keuangan, dan Pencegahan Penipuan.

Di Indonesia, rangkaian kegiatan WIW 2025 bekerja sama dengan OJK dalam konsep *webinar*. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, sebagai pembicara menyampaikan sambutan dan materinya yang bertemakan “Empowering Investors: Invest Wisely and Stay Safe from Fraud and Scams”.

Menurut Friderica, kegiatan ini amat penting sebagai pengingat bahwa edukasi merupakan bagian penting dari pelindungan konsumen yang dapat meningkatkan keyakinan masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa keuangan, sekaligus strategi pencegahan terhadap penipuan dan kejahatan di sektor jasa keuangan. “Membangun kepercayaan konsumen di sektor jasa keuangan sangat esensial. Konsumen tidak hanya berperan dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian vital dalam menjaga kestabilan sistem keuangan. Menjaga kepercayaan sifatnya wajib dan harus, bahkan pasar yang kuat tanpa adanya kepercayaan akan runtuh,” kata Friderica.

Ketua Komite IOSCO untuk Investor Ritel Kanada, Camille Beaudoin, menyampaikan apresiasinya kepada OJK yang telah melaksanakan *webinar* ini dengan melibatkan narasumber ekspertis di bidang peningkatan literasi keuangan dan pelindungan konsumen serta masyarakat dari berbagai negara.

Selang beberapa hari, dilaksanakan Capital Market Summit & Expo 2025 pada 17-18 Oktober 2025. Acara ini merupakan puncak peringatan 48 tahun pasar modal Indonesia yang diselenggarakan oleh OJK, Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan tema “Pasar Modal untuk Rakyat: Satu

Pasar Berjuta Peluang”. Tujuannya masih sama dengan kegiatan WIW, yakni meningkatkan literasi dan inklusi investasi di pasar modal Indonesia, melalui kampanye “Aku Investor Saham” serta upaya untuk mendekatkan pasar modal kepada masyarakat.

Penekanannya adalah bahwa pasar modal Indonesia bukan hanya milik kalangan tertentu, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Satu pasar modal Indonesia mampu membuka berjuta peluang, mulai dari peluang investasi bagi masyarakat, pendanaan bagi perusahaan, hingga pertumbuhan ekonomi bagi bangsa.

Dari terselenggaranya acara ini, jumlah investor pasar modal Indonesia hampir mencapai 19 juta, termasuk lebih dari 8 juta investor saham. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam partisipasi masyarakat berinvestasi di pasar modal.



# OJK Luncurkan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025-2030

Dalam rangka mendorong tumbuhnya pelaku usaha gadai di Indonesia, OJK melakukan deregulasi terhadap ketentuan POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian, antara lain dengan penyederhanaan persyaratan izin usaha gadai yang belum berizin OJK dan penyesuaian rangkap jabatan bagi tenaga penaksir.

Industri pergadaian memiliki peran penting dalam mendorong inklusi keuangan masyarakat serta mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Asta Cita Pemerintah. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Pergadaian (*Roadmap* Pergadaian) 2025-2030. *Roadmap* itu menjadi panduan strategis membangun industri pergadaian nasional yang sehat, tangguh, inklusif, dan berdaya saing.

Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar menjelaskan *roadmap* itu merupakan mandat Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), serta buah hasil kerja kolaboratif dan sinergi semua *stakeholders*. Dia bilang *roadmap* itu juga dirancang untuk memperkuat industri pergadaian.

Mahendra berharap adanya *roadmap* itu juga menegaskan kembali komitmen untuk menjadikan pergadaian bukan hanya sekadar penyedia pinjaman, melainkan mitra pemberdayaan ekonomi nasional. Ia menambahkan, *roadmap* ini dapat menjadi tonggak sejarah penting bagi industri pergadaian Indonesia, industri yang tidak hanya tumbuh secara finansial, tapi juga berkontribusi dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat, memperluas inklusi keuangan, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Dalam rangkaian peluncuran *Roadmap* Pergadaian 2025-2030, dilakukan seremonial pemberian izin perusahaan pergadaian kepada PT Gadai Mas Nusantara, dengan lingkup wilayah nasional, yang menandai dimulainya suatu rezim pengaturan yang baru, dimana wilayah usaha pergadaian dapat mencakup lingkup nasional sebagaimana



diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.

Dalam kesempatan ini, OJK juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada *stakeholders*, baik internal maupun



eksternal, yang telah memberikan masukan secara komprehensif dan terlibat dalam proses penyusunan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025-2030, serta berharap secara bersama-sama dapat mengawal implementasinya.

Acara turut dihadiri oleh jajaran pimpinan di bidang PVML OJK, Prof. Rofikoh Rokhim selaku akademisi, perwakilan Kementerian/Lembaga, asosiasi terkait, serta perwakilan perusahaan pergadaian. Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan ada tiga kategori fase yang tertuang dalam *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Pergadaian periode 2025-2030. Fase pertama adalah penguatan fondasi dan konsolidasi pergadaian pada periode 2025-2026, kemudian fase menciptakan momentum pada 2027-2028, lalu fase penyesuaian dan pertumbuhan pada 2029-2030.

Agusman menerangkan ada empat pilar yang menjadi penopang industri pergadaian sebagaimana tertuang dalam *roadmap*. Pilar pertama terkait permodalan, tata kelola, manajemen risiko, dan sumber daya manusia. Pilar kedua terkait edukasi dan perlindungan konsumen.

Pilar ketiga mengenai ekosistem, yang mana industri pergadaian sangat membutuhkan ekosistem yang mendukung. Misalnya, industri pergadaian perlu memiliki infrastruktur yang memadai dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya, pilar keempat adalah pengaturan, pengawasan, dan perizinan.

Agusman menerangkan dalam memperkuat pilar keempat sebenarnya OJK sudah mengeluarkan POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang pergadaian. Selain itu, menurut UU P2SK, perizinan pergadaian juga sudah

bisa tidak hanya mencakup lingkup kabupaten/kota, tetapi kini bisa lingkup usaha nasional atau provinsi.

Agusman menambahkan OJK akan terus melakukan *review* terhadap *roadmap* pergadaian. Dia bilang bahwa dokumen yang ada di dalam *roadmap* merupakan *living document*. Artinya, sangat mungkin diubah atau

disesuaikan dengan dinamika yang terjadi di lapangan.

Dalam aspek tata kelola, OJK akan memperkuat pengawasan berbasis risiko, menyempurnakan regulasi, dan memperkuat perizinan di tingkat pusat maupun daerah. Dari sisi perlindungan konsumen, OJK akan meningkatkan edukasi publik tentang hak dan kewajiban nasabah, mengenalkan layanan gadai syariah, serta menindak perusahaan gadai ilegal.

Selain itu, OJK juga akan mendorong pembentukan lembaga sertifikasi profesi di sektor pergadaian dan memperluas sinergi dengan lembaga jasa keuangan lainnya. Strategi pembangunan produk dan pasar pun menjadi fokus utama. Termasuk penguatan penerapan keuangan berkelanjutan, peningkatan jumlah pelaku gadai syariah, dan digitalisasi layanan dan infrastruktur penyimpanan jaminan.

Terlebih peran layanan gadai sangat signifikan dalam membuka akses pembiayaan bagi kelompok ekonomi kecil dan menengah, serta berkontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan di berbagai

daerah. Deregulasi pun bakal dilakukan terhadap



Peraturan OJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian, yang mencakup penyederhanaan persyaratan izin usaha bagi perusahaan gadai yang belum berizin, serta penyesuaian aturan rangkap jabatan bagi tenaga penaksir.

Hingga Agustus 2025, terdapat 214 perusahaan pergadaian di Indonesia yang telah berizin usaha dari OJK. Aset industri pergadaian telah mencapai Rp129,83 triliun dengan pertumbuhan sebesar 27,36% yoy. Di sisi pembiayaan, total penyaluran pergadaian per Agustus 2025 mencapai sebesar Rp108,30 triliun, atau meningkat sebesar 28,67% yoy. Penyaluran terbesar dilakukan dengan sistem gadai, yaitu sebesar Rp90,08 triliun atau 83,17% dari total penyaluran.



# Rangkaian Kegiatan Edukasi Syariah

**Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program edukasi dan sosialisasi terus digalakkan.**

**P**ada 20 Oktober 2025, OJK bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melaksanakan kegiatan Forum Edukasi dan Temu Bisnis Keuangan Syariah (FEBIS) dan Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH) di Pondok Pesantren API Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, sebagai upaya memperkuat literasi keuangan syariah dan kemandirian ekonomi UMKM.

Kegiatan yang juga merupakan peringatan Hari Santri Nasional ini dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, serta Ketua PBNU Bidang Ekonomi Fahmy Akbar Idries, Pengasuh Pondok Pesantren APIAsri Tegalrejo K.H. Achmad Izzudin, serta diikuti oleh lebih dari 2.000 santri dan 79 pelaku UMKM.

Rangkaian kegiatan mencakup edukasi keuangan syariah, *workshop* pengembangan usaha, dan *business*

*matching* antara pengusaha UMKM dengan lembaga jasa keuangan syariah. Program ini merupakan bagian dari inisiatif Nahdlatul Ulama *Business Catalyst* (NUBIC) yang mengedepankan edukasi, inkubasi, dan akselerasi UMKM pada ekosistem syariah.

OJK menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan di lingkungan pesantren merupakan langkah nyata dalam memperluas akses keuangan nasional dan memperkuat ekonomi inklusif berbasis nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan. Masih di hari yang sama, OJK melanjutkan rangkaian kegiatan edukasi keuangan dengan menjadi narasumber dalam program OJK dan LPS Mengajar di SMA Negeri 3 Yogyakarta, bersama Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu.

Kegiatan bertema “Generasi Muda Mandiri Finansial, Menuju Indonesia Emas” ini diikuti oleh sekitar 650 pelajar, guru dan karyawan, serta menjadi bagian dari rangkaian



peringatan HUT ke-14 OJK. Sebagai bagian dari kegiatan, OJK juga memperkenalkan platform LMSKU (*Learning Management System* Edukasi Keuangan) dan program OJK PEDULI (Penggerak Duta Literasi Keuangan Indonesia), serta mengukuhkan dua Duta Literasi Keuangan dari siswa SMA Negeri 3 Yogyakarta.

Pada 4 November 2025, OJK terus berupaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah nasional khususnya untuk generasi muda melalui Grand Final *Indonesia Sharia Financial Olympiad* (ISFO) Tahun 2025 yang diselenggarakan di Kantor OJK Provinsi Jawa Timur. Generasi muda bukan hanya sebagai penerima manfaat sistem keuangan syariah tetapi juga berperan sebagai penentu arah, pembentuk pasar, dan penerus ekosistem keuangan syariah masa depan Indonesia. Melalui pelaksanaan ISFO ini diharapkan akan melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul di keuangan syariah.

ISFO 2025 diikuti oleh sebanyak 10.736 peserta dari 3.504 tim yang berasal dari seluruh Indonesia, meningkat sebanyak 143% dari tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan minat dan antusiasme generasi muda terhadap keuangan syariah terus meningkat, sekaligus menegaskan generasi muda memiliki keingintahuan dan semangat belajar yang luar biasa terhadap nilai keuangan syariah.

Rangkaian kegiatan ISFO 2025 berlangsung dari 1 Agustus hingga 4 November 2025 dengan dua jenis kompetisi, yaitu Kompetisi Cerdas Cermat Keuangan Syariah dan Wirausaha Muda Syariah. Kompetisi Cerdas Cermat Keuangan Syariah bertujuan untuk menguji pengetahuan dan pemahaman peserta tentang keuangan syariah. Kompetisi Wirausaha Muda Syariah bertujuan untuk menumbuhkan semangat wirausaha dan kemandirian ekonomi

kepada mahasiswa yang telah memiliki bisnis/usaha mikro.

Kegiatan Grand Final ISFO dilakukan secara *hybrid* yang diikuti oleh mahasiswa dan pelajar di seluruh Indonesia. Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula penyerahan dua produk keuangan secara simbolis kepada peserta. Pertama, SimPel iB PT Bank Syariah Indonesia kepada perwakilan finalis nasional Cerdas Cermat Keuangan Syariah Kategori Pelajar, diterima oleh perwakilan dari SMAN 2 Kuningan. Kedua, penyerahan produk Tabungan Emas Unit Usaha Syariah PT Pegadaian kepada perwakilan dari finalis Wirausaha Muda Syariah, Sdri. Balqis Salimah dengan Karya Usaha Kopi Voyee.

Pada 6 November 2025, OJK bersama pelaku industri jasa keuangan syariah, *self-regulatory organization* (SRO), asosiasi, dan kementerian/ lembaga terkait menggelar Pembukaan EKSis 2025 di Lippo Mall Nusantara, Jakarta. Kegiatan ini, mengusung tema “Keuangan Syariah untuk Semua, Kesejahteraan untuk Bangsa” sebagai upaya memperkuat literasi, inklusi, dan ekosistem keuangan syariah nasional.

Melalui kegiatan ini, OJK mendorong agar keuangan syariah semakin dekat dengan masyarakat dan menjadi motor penggerak ekonomi umat, khususnya pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain pameran layanan keuangan syariah, EKSis 2025 juga menghadirkan seminar, *talk show*, serta program edukasi publik yang dikemas interaktif.

Kegiatan EKSis di Jakarta ini menjadi puncak dari rangkaian ekspose keuangan syariah sepanjang tahun 2025 yang sebelumnya telah digelar di empat kota, yakni Tangerang, Palembang, Bandung, dan Mataram. EKSis 2025 menghadirkan sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam memperluas akses

layanan keuangan berbasis prinsip syariah secara berkelanjutan.

Selain Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, dan Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, turut hadir dalam pembukaan EKSis 2025 Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Anggota Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Mokhammad Hidayat, Deputi Bidang Kewirausahaan Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Siti Azizdah, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi, Kepala OJK Jabodetabek Edwin Nurhadi, serta Pimpinan Kementerian/ Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, Direksi dan Pimpinan Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah.

Penutupan EKSis dilakukan pada 9 November 2025 oleh M. Ismail Riyadi, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK. OJK mengapresiasi seluruh partisipan EKSis yang telah ikut serta dalam rangkaian kegiatan EKSis 2025 yakni 37 Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah (PUJKS) dari sektor perbankan, pasar modal, asuransi, penjaminan, pergadaian, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selama periode EKSis 2025, tercatat jumlah pengunjung sebanyak 12.893 orang dan jumlah pembukaan rekening sebanyak 9.489 akun dari aktivitas transaksi penyaluran maupun penghimpunan dana.

OJK juga mengapresiasi peran *Organizing Committee* Orkestrasi Program Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (OC LIKS) yang telah membantu mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan EKSis dan mendorong kolaborasi antara PUJK Syariah guna mencapai misi bersama, yakni peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.



## Bagaimana Konsumen Melindungi Diri dari Ancaman *Deepfake*?

*Deepfake* menjadi ancaman serius bagi otentikasi biometrik di sektor jasa keuangan karena kemampuannya untuk menciptakan video dan audio yang sangat realistis. Bagaimana cara konsumen melindungi diri dari pelaku penipuan?

**K**ecanggihan teknologi kecerdasan buatan (AI) jika digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tentu akan membawa bencana. Salah satunya penyalahgunaan teknologi AI melalui *deepfake*, yakni media palsu untuk memanipulasi gambar, suara, atau video, sehingga tampak sangat

realistis. Teknologi ini dapat membuat seseorang tampak mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukannya, dan sering kali digunakan untuk tujuan jahat seperti penipuan dan penyebaran informasi palsu.

Jika penyalahgunaan ini terjadi di ranah sektor jasa keuangan,

maka dampaknya teramat sangat merugikan. Pelaku penipuan dapat meniru identitas seseorang dan mengelabui sistem verifikasi biometrik (pengenalan wajah atau suara) selama proses orientasi nasabah atau verifikasi transaksi.

Lantas bagaimana langkah antisipasi konsumen terhadap ancaman



*deepfake*? **Pertama**, hendaknya batasi jejak digital kita, misalnya dengan mengontrol unggahan di dunia maya. Jangan terlalu banyak membagikan foto atau video berkualitas tinggi secara publik di media sosial. **Kedua**, kelola privasi dalam pengaturan akun media sosial. Seperti membatasi akses kepada siapa saja yang dapat melihat konten kita. Semakin sedikit materi yang bisa diakses, semakin sulit bagi penipu untuk membuat *deepfake* yang meyakinkan.

**Ketiga**, perkuatlah keamanan akun kita. Aktifkan otentikasi multifaktor (MFA) dengan menggunakan otentikasi berlapis untuk akun keuangan, seperti kombinasi biometrik, kata sandi, dan Kode Sandi Satu Kali (OTP) yang dikirimkan ke perangkat lain. Ini memastikan bahwa akses memerlukan lebih dari sekadar data biometrik yang mungkin bisa direkayasa. **Keempat**, waspadalah terhadap permintaan mendesak, jangan pernah langsung percaya jika ada video atau pesan suara yang mencurigakan yang meminta transfer dana segera. Selalu verifikasi permintaan tersebut melalui saluran lain atau hubungi langsung pihak yang bersangkutan.

**Kelima**, manfaatkan fitur keamanan yang disediakan lembaga keuangan. Biasanya lembaga keuangan memiliki upaya mitigasi untuk menghadapi ancaman *deepfake*. Umumnya, mereka sudah memakai fitur deteksi keaslian (*liveness detection*) yang fungsinya untuk membedakan antara wajah atau suara asli dengan *deepfake*. Fitur ini biasanya meminta konsumen untuk melakukan tindakan acak, seperti mengedipkan mata atau memiringkan kepala, untuk membuktikan bahwa mereka bukan rekaman atau *deepfake*.

**Keenam**, selalu tingkatkan literasi digital dan skeptisisme kita, ya. Kenalilah tanda-tanda *deepfake* dengan mempelajari

ketidaktepatan pada *deepfake*, seperti pergerakan mata yang tidak alami, pencahayaan yang aneh, atau distorsi pada audio. Dan **terakhir**, perhatikan permintaan informasi pribadi. Hindari memberikan data sensitif sebab lembaga keuangan sesungguhnya tidak akan pernah

meminta data pribadi yang sensitif, seperti PIN atau OTP, melalui telepon, email, atau media sosial. Segera laporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan, sebab bisa jadi kita telah menjadi target serangan *deepfake* atau penipuan.



Masih dari teknologi keuangan, QRIS Tap kini sudah resmi diluncurkan dan siap digunakan. Apa itu QRIS Tap? Merupakan inovasi pembayaran digital yang memungkinkan penumpang transportasi umum membayar tarif dengan menempelkan ponsel ke mesin pembaca (*tap-in/tap-out*) tanpa perlu kartu fisik. Fitur ini dapat digunakan di beberapa moda transportasi seperti KRL Commuter Line, MRT Jakarta, LRT Jakarta dan LRT Jabodebek, serta Transjakarta (non-BRT dan di halte utama BRT secara bertahap). Cara kerjanya adalah dengan menggunakan fitur QRIS Tap di aplikasi e-wallet atau *mobile banking* pilihan kita.

Fitur QRIS Tap ini diluncurkan bertepatan dengan momentum Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 di Hall B, JCC Jakarta, pada 30 Oktober 2025. Sebagai inovasi layanan digital, QRIS Tap diharapkan dapat menghadirkan *user experience* yang baru dan akses keuangan yang inklusif bagi masyarakat.

Tak hanya di Jabodetabek, Bank Indonesia juga mencatat 13 provinsi lain telah mulai mengadopsi QRIS Tap di berbagai moda transportasi seperti bus DAMRI dan angkutan perkotaan. Ke depan, fitur ini juga akan diperluas ke sektor ritel, parkir, dan UMKM, memperkuat posisinya sebagai standar pembayaran digital universal di Indonesia



## Peran Indonesia di Forum Kolaborasi Internasional

**Indonesia merupakan negara yang aktif tentunya dalam berorganisasi serta bekerja sama dengan negara-negara yang lain di bidang ekonomi. Peran Indonesia dalam berbagai kerja sama turut membangun pertumbuhan ekonomi bagi negara sendiri dan negara lain.**

perbankan regional, dan diplomasi ekonomi, sambil tetap mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Peran ini tentu saja menjadikan Indonesia mitra penting yang mengedepankan diplomasi dan stabilitas global.

Seperti pada momentum pembaruan komitmen kerja sama dalam pengembangan bidang teknologi keuangan (*fintech*), melalui OJK, Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Singapura yang diwakili oleh Monetary Authority of Singapore (MAS) pada 10 November 2025. Penandatanganan ini memperbarui kesepakatan serupa yang telah dibuat pada 2018. Melalui MoU terbaru ini, OJK dan MAS

**T**erkait berbagai isu ekonomi, Indonesia kerap memainkan peran penting

di forum internasional dengan fokus pada penguatan stabilitas sektor jasa keuangan global, integrasi



sepakat memperluas kolaborasi dalam pengembangan inovasi keuangan digital, termasuk pemanfaatan aset keuangan digital dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*).

Beberapa inisiatif utama yang tercantum dalam MoU ini mencakup:

- Pertukaran ide dan praktik terbaik antara OJK dan MAS.
- Peningkatan kerja sama industri keuangan di Indonesia dan Singapura, termasuk keterlibatan aktif dalam badan-badan industri.
- Rujukan bagi perusahaan fintech potensial untuk berpartisipasi dalam *regulatory sandbox* di masing-masing negara.
- Fasilitasi pertukaran informasi lintas batas bagi perusahaan *fintech* yang beroperasi sesuai peraturan dan ruang lingkup izin usaha yang berlaku.

Momentum kerja sama lainnya juga terjalin lewat partisipasi Indonesia pada gelaran ASEAN Capital Market Forum (ACMF) ke-43 pada 6 November 2025. Melalui forum ini, diluncurkan Rencana Aksi 2026–2030 (ACMF *Action Plan* 2026–2030 / AP 2026) yang menjadi peta jalan pengembangan pasar modal ASEAN lima tahun ke depan.

AP 2026 dirancang untuk memperkuat integrasi, keberlanjutan, dan daya saing pasar modal kawasan dengan 11 prioritas utama dan 24 inisiatif strategis yang terbagi dalam lima pilar, antara lain; membangun ACMF yang berkelanjutan; membangun ASEAN yang tangguh dan berkelanjutan; mendorong inklusivitas dan pemberdayaan keuangan, memperkuat integrasi regional dan posisi global, serta mendorong digitalisasi.

Dalam pertemuan tersebut para regulator termasuk OJK yang mewakili Indonesia, juga membahas kerja sama dalam Asia Green Transformation (GX) Consortium, kolaborasi

dengan International Sustainability Standards Board (ISSB) terkait standar pengungkapan keberlanjutan IFRS, serta penguatan kerangka ASEAN Collective Investment Scheme (CIS). Selain itu, ACMF ikut menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) untuk memperkuat riset, kebijakan, dan pembangunan kapasitas di bidang keuangan berkelanjutan, integrasi pasar, dan digitalisasi.

Peran Indonesia lainnya juga terlihat dalam pelaksanaan *webinar* oleh

sama strategis dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam forum International Network on Financial Education (INFE) yang digelar pada 1 Desember 2025. OJK bersama OECD berkolaborasi untuk memperkuat tata kelola dan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab melalui pengembangan kerangka tokenisasi aset yang adaptif dan inklusif. Selama dua hari, topik yang dibahas yakni mengenai fondasi tata kelola AI dan tokenisasi dan masa depan infrastruktur keuangan digital.



OJK dimana keterlibatan Indonesia sebagai anggota International Organization of Securities Commissions (IOSCO) memeriahkan acara tahunan World Investor Week (WIW) 2025. OJK bersama IOSCO Committee 8 menyelenggarakan *webinar* internasional pada 9 Oktober 2025 untuk meningkatkan kesadaran tentang investasi cerdas, pencegahan penipuan, dan perlindungan investor, sejalan dengan kampanye global IOSCO.

Lalu, OJK juga menjalin kerja

“Kegiatan ini menjadi bagian dari kerja sama strategis antara OJK dan OECD yang telah terjalin erat selama beberapa tahun terakhir melalui dialog kebijakan, kajian, hingga program pengembangan kapasitas seperti *secondment* pegawai OJK ke OECD dalam topik keuangan berkelanjutan. Kolaborasi ini kini diperluas untuk mencakup sektor keuangan digital, termasuk kecerdasan artifisial dan aset digital,” kata Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK Mirza Adityaswara.

# Komitmen KP2MI Beri Perlindungan Bagi PMI



**Muh. Fachri, S.STP., M.Si.,**  
Direktorat Jenderal Pekerja Migran Indonesia (PMI)

**P**ada 10 November 2025, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Buku Saku Edukasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Keluarga. Program ini menjadi langkah nyata sinergi lembaga negara untuk memperkuat perlindungan finansial dan literasi keuangan para pahlawan devisa.

Bagaimana tanggapan Bapak Muh. Fachri, S.STP., M.Si. selaku Direktorat Jenderal Pekerja Migran Indonesia (PMI) menanggapi peluncuran Buku Saku Edukasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Keluarga.

**Apa tanggapan Bapak dengan diluncurkannya Buku Saku Edukasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Keluarga?**

Saya menyambut secara positif dan strategis peluncuran Buku Saku Literasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga. Buku ini bukan sekadar materi bacaan, melainkan sebuah instrumen pemberdayaan nyata yang dirancang untuk menjawab kebutuhan riil para pekerja migran dan keluarganya dalam mengelola hasil kerja secara bijak, aman, dan berkelanjutan.

Bagi kami, buku ini mencerminkan kehadiran negara yang tidak hanya hadir pada saat penempatan, tetapi juga mendampingi perjalanan hidup para PMI secara utuh, mulai dari sebelum berangkat, selama bekerja, hingga kembali ke tanah air. Peluncuran buku ini juga menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem perlindungan dan pemberdayaan yang berkelanjutan melalui sinergi antar lembaga, seperti Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, OJK, dan Bank Indonesia.

**Apa tujuan diluncurkannya buku ini? Seberapa penting manfaat buku ini bagi pekerja migran? Setelah buku ini diluncurkan, bagaimana tindak lanjut penggunaan/pemanfaatan buku ini bagi PMI dan Keluarga?**

Tujuan utama diterbitkannya Buku Saku Literasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga adalah untuk membangun fondasi literasi keuangan yang kuat dan berkelanjutan, tidak hanya bagi para PMI sebagai pencari nafkah, tetapi juga bagi keluarga yang berperan penting dalam mengelola hasil jerih payah tersebut. Buku ini hadir sebagai upaya negara memastikan bahwa setiap rupiah yang dihasilkan dari kerja keras para PMI dapat dikelola secara bijak, aman, dan produktif demi kesejahteraan jangka panjang keluarga.

Melalui buku ini, pemerintah ingin mendorong perubahan cara pandang dari sekadar menerima dan membelanjakan remitansi, menjadi kemampuan merencanakan, mengelola, dan mengembangkannya. Buku ini memberikan pemahaman praktis tentang pengelolaan keuangan keluarga, perencanaan tabungan dan investasi, pencegahan penipuan serta risiko keuangan, hingga pemanfaatan remitansi untuk kegiatan produktif seperti usaha, pendidikan, dan perlindungan masa depan.

Manfaat buku ini menjadi sangat signifikan karena menysasar titik krusial dalam siklus migrasi, yakni pengelolaan hasil kerja. Selama ini, tidak sedikit PMI yang telah bekerja



keras di luar negeri namun belum merasakan peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan akibat keterbatasan literasi keuangan. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk memperkuat peran keluarga sebagai mitra strategis PMI dalam mengelola remitansi secara sehat, produktif, dan bertanggung jawab.

Sebagai tindak lanjut, pemanfaatan buku ini tidak berhenti pada peluncuran semata. Buku ini akan diintegrasikan dalam berbagai tahapan layanan, mulai dari edukasi pra-keberangkatan, pendampingan selama masa kerja, hingga pembinaan purna penempatan. Selain itu, buku ini juga akan digunakan dalam kegiatan pendampingan keluarga PMI di daerah asal, melalui Desa Migran Emas, komunitas, serta kerja sama dengan lembaga keuangan dan pemerintah daerah. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, buku ini diharapkan menjadi instrumen nyata dalam membangun kemandirian ekonomi keluarga PMI dan memperkuat dampak positif migrasi bagi pembangunan nasional.

### **Bagaimana KP2MI memberikan perlindungan kepada pekerja migran? Program apa saja yang dilakukan?**

Sebagai bagian dari komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menjalankan mandat perlindungan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Perlindungan ini tidak hanya dimaknai sebagai upaya pengamanan selama bekerja di luar negeri, tetapi sebagai suatu proses berkelanjutan yang mencakup perlindungan, pemberdayaan, serta keberlanjutan kesejahteraan PMI dan keluarganya.

Pada tahap pra-penempatan, KP2MI memastikan bahwa setiap calon PMI dibekali dengan kapasitas yang memadai melalui pelatihan

vokasi, peningkatan keterampilan, pemahaman bahasa dan budaya negara tujuan, serta literasi hukum dan keuangan. Proses penempatan dilakukan secara prosedural melalui sistem digital resmi, seperti SISKOP2MI, guna mencegah praktik penempatan ilegal dan meminimalkan risiko eksploitasi sejak awal.

Selama masa penempatan, negara hadir melalui perlindungan sosial dan ketenagakerjaan. PMI didaftarkan dalam program jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan, serta mendapatkan pendampingan dan perlindungan apabila menghadapi permasalahan hukum, ketenagakerjaan, maupun kondisi darurat di negara tujuan. KP2MI juga menjalin koordinasi aktif dengan perwakilan RI di luar negeri serta pemerintah negara penempatan untuk memastikan pemenuhan hak-hak pekerja migran sesuai standar internasional.

Sementara itu, pada fase pemberdayaan dan reintegrasi, KP2MI memfokuskan kebijakan pada penguatan kapasitas ekonomi PMI dan keluarganya. Program seperti edukasi keuangan, pendampingan kewirausahaan, pengelolaan remitansi produktif, hingga pengembangan Desa Migran Produktif menjadi instrumen penting agar PMI tidak hanya bekerja, tetapi mampu membangun kemandirian ekonomi setelah kembali ke tanah air. Pendekatan ini menempatkan keluarga sebagai bagian penting dari ekosistem perlindungan, karena merekalah pengelola utama remitansi dan penopang keberlanjutan kesejahteraan.

Melalui kolaborasi dengan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, lembaga keuangan, serta mitra strategis lainnya, KP2MI terus memperkuat sistem perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian, perlindungan terhadap PMI tidak berhenti pada aspek keamanan semata, tetapi berkembang menjadi upaya

pemberdayaan yang utuh, berorientasi pada martabat, kesejahteraan, dan masa depan pekerja migran Indonesia beserta keluarganya.

### **Apa harapan dan pesan Bapak bagi pekerja migran Indonesia?**

Sebagai Direktur Jenderal, saya ingin menyampaikan pesan dan harapan yang tulus kepada seluruh Pekerja Migran Indonesia di mana pun berada. Saudara-saudara adalah duta bangsa, pahlawan ekonomi yang tidak hanya menghidupi keluarga, tetapi juga turut menopang perekonomian nasional. Setiap tetes keringat dan kerja keras yang Anda curahkan memiliki arti yang sangat besar bagi masa depan keluarga, daerah asal, dan bangsa Indonesia.

Saya mengajak seluruh PMI untuk senantiasa bekerja dengan profesionalisme, disiplin, dan integritas tinggi, serta memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri. Gunakanlah pengetahuan dan literasi keuangan yang telah diberikan untuk mengelola penghasilan secara bijak, merencanakan masa depan, dan membangun ketahanan ekonomi keluarga. Remitansi yang dikelola dengan baik bukan hanya menjadi sumber nafkah, tetapi juga fondasi bagi kemandirian dan kesejahteraan jangka panjang.

Saya juga menegaskan pentingnya menggunakan jalur resmi dan prosedural dalam bekerja di luar negeri, serta selalu waspada terhadap berbagai bentuk penipuan dan praktik yang merugikan. Akhir kata, saya ingin menegaskan bahwa pemerintah akan terus hadir, melindungi, dan memberdayakan pekerja migran Indonesia. Namun, kekuatan terbesar tetap terletak pada semangat, ketekunan, dan kebersamaan kita semua. Ketika pekerja migran dan keluarganya berdaya, maka Indonesia akan tumbuh menjadi bangsa yang lebih mandiri, tangguh, dan sejahtera.



## Tingkatkan Pemberdayaan UMKM, OJK Terbitkan POJK 19/2025

OJK menerbitkan POJK 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (POJK UMKM) sebagai upaya memberdayakan UMKM untuk meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan tindak lanjut dari UU P2SK yang mengamankan OJK mengembangkan sektor UMKM. Berikut ulasan aturannya.

**P**eraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 ini mengatur tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Beleid ini bertujuan mendorong perbankan dan Lembaga Keuangan Nonbank (LKNB) memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM secara mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.

"Dengan diberlakukannya POJK ini, bank dan LKNB diharapkan menghadirkan pendekatan yang lebih inovatif untuk menyediakan produk keuangan sesuai kebutuhan setiap segmen UMKM," ujar Kepala Eksekutif



Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae.

Dian menegaskan, penerbitan POJK UMKM ini menjadi bentuk dukungan OJK agar UMKM semakin berdaya saing dan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

Regulasi ini juga merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang telah melalui proses konsultasi dengan DPR RI.

Dalam POJK UMKM mengatur kewajiban bank umum, Bank Perekonomian Rakyat (BPR), bank syariah, BPR syariah, serta LKNB konvensional dan syariah untuk menyediakan berbagai kemudahan akses pembiayaan. Bentuk kemudahan yang dimaksud antara lain, penyederhanaan persyaratan atau metode penilaian kelayakan usaha, skema pembiayaan khusus sesuai karakteristik usaha.

Termasuk jaminan berupa kekayaan intelektual, percepatan proses bisnis dengan memanfaatkan Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA), penetapan biaya pembiayaan yang wajar, dan kolaborasi antar lembaga keuangan dan dukungan pemerintah.

Hingga Juli 2025, total kredit perbankan tumbuh 7,03% *year-on-year* (yoy) menjadi Rp8.043,2 triliun. Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Investasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 12,42%, diikuti Kredit Konsumsi 8,11%, dan Kredit Modal Kerja 3,08%.

Dari sisi kategori debitur, kredit korporasi tumbuh 9,59%, sementara kredit UMKM meningkat 1,82%, seiring fokus perbankan dalam pemulihan kualitas kredit UMKM. Jika dilihat per sektor ekonomi, penyaluran kredit ke beberapa sektor mencatat pertumbuhan tahunan dua digit. Sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 20,69%; sektor jasa 19,17%; sektor transportasi dan komunikasi 17,94%; serta sektor listrik, gas, dan air

tumbuh 11,23%.

Anggota Komisi XI DPR, Puteri Anetta Komarudin merespons positif terbitnya POJK 19/2025. Menurutnya, aturan tersebut dapat memangkas prosedur rumit yang selama ini menjadi kendala utama UMKM dalam mengakses pembiayaan formal. "Harapannya akses modal usaha bisa lebih mudah dijangkau dengan adanya peraturan ini, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terjerat rentenir maupun pinjaman *online* ilegal," ujar Puteri.

Dengan terbitnya POJK UMKM ini OJK menegaskan dukungannya agar UMKM dapat semakin berdaya saing dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Melalui kolaborasi sektor jasa keuangan, pemerintah, dan dunia usaha, aturan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembiayaan UMKM yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan.



A vibrant, stylized illustration in shades of pink, purple, and blue. It depicts a woman on the left and a man on the right, both interacting with a large central screen that features a prominent play button icon. The woman is holding a smartphone and gesturing towards the screen. The man is also holding a smartphone. Surrounding the central screen are various digital icons: a lightbulb, a speech bubble with the number '1', a musical note, a film strip, a gear, a Wi-Fi symbol, a speech bubble with an equals sign, a pencil, a magnifying glass, a location pin, and a speech bubble with the number '1'. The background consists of large, overlapping circles in shades of pink and purple.

## Profesi Konten Kreator: Membangun Karier di Dunia Digital

Di era digital yang serba cepat ini, profesi konten kreator semakin populer dan menjanjikan. Lebih dari sekadar hobi, menjadi konten kreator kini menjadi sebuah karir yang dapat menghasilkan pendapatan signifikan.

**E**ra digital telah mengubah wajah dunia kerja secara drastis dalam dua dekade terakhir. Otomatisasi, kecerdasan buatan, dan digitalisasi

tidak hanya mengubah cara kita bekerja tetapi juga menghapus kebutuhan akan berbagai pekerjaan tradisional. Data memprediksi bahwa pada tahun 2025, sebanyak 85 juta pekerjaan akan hilang akibat pergeseran tugas antara manusia dan mesin, namun di sisi lain, sekitar 97 juta peran baru diperkirakan



akan tercipta sebagai dampak dari transformasi ini.

Seiring hilangnya pekerjaan lama, ekonomi digital melahirkan peluang kerja baru yang belum pernah ada sebelumnya. Pengembang aplikasi, analis data, ahli keamanan siber, spesialis SEO, manajer media sosial, dan konten kreator menjadi profesi yang sangat diminati.

Istilah “konten kreator” semakin sering terdengar di berbagai *platform* media sosial. Mulai dari YouTube, Instagram, TikTok, hingga blog dan *podcast*, konten kreator menjadi sorotan utama dalam membentuk opini, hiburan, dan bahkan gaya hidup. Profesi konten kreator semakin populer dan menjanjikan. Lebih dari sekadar hobi, menjadi konten kreator kini menjadi sebuah karir yang dapat menghasilkan pendapatan signifikan. Dengan bermodalkan kreativitas, kemampuan komunikasi yang baik, dan pemahaman tentang *platform* digital, siapa pun dapat meraih kesuksesan di bidang ini.

Konten kreator adalah individu yang menciptakan dan mendistribusikan konten yang menarik dan relevan untuk audiens tertentu. Konten tersebut dapat berupa tulisan, gambar, video, audio, atau kombinasi dari berbagai format. Tujuan utama seorang konten kreator adalah untuk menarik perhatian audiens, membangun komunitas, dan pada akhirnya, menghasilkan pendapatan melalui berbagai cara, seperti iklan, *endorsement*, atau penjualan produk dan jasa.

Profesi ini menawarkan fleksibilitas dan otonomi yang tinggi. Konten kreator dapat bekerja dari mana saja dan kapan saja, asalkan memiliki akses ke internet dan peralatan yang memadai. Mereka juga memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri dan menciptakan konten sesuai dengan minat dan bakat mereka. Namun, menjadi konten kreator juga membutuhkan kerja keras, disiplin,

dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan tren dan algoritma *platform* digital.

Menjadi konten kreator menawarkan sejumlah peluang yang menarik, baik dari segi finansial maupun pengembangan pribadi. Berikut adalah beberapa peluang utama yang dapat diperoleh:

- **Sumber Pendapatan Alternatif**

Konten kreator memiliki banyak jalur untuk mendapatkan pendapatan. Selain pendapatan dari iklan yang ditayangkan di video atau blog, kreator juga dapat memanfaatkan *sponsorship*, *affiliate marketing*, serta penjualan *merchandise*. Pendapatan yang bersifat pasif juga memungkinkan kreator untuk terus menghasilkan uang bahkan ketika mereka tidak aktif membuat konten baru.

- **Kebebasan Kreatif**

Salah satu daya tarik utama menjadi konten kreator adalah kebebasan untuk berekspresi. Kreator bebas menentukan tema, gaya penyampaian, dan *platform* yang sesuai dengan *passion* mereka. Kebebasan ini tidak hanya mendorong inovasi, tetapi juga memungkinkan terciptanya konten yang autentik dan unik.

- **Peluang Networking dan Kolaborasi**

Dunia konten kreator sangat kolaboratif. Banyak kreator yang bekerja sama dalam proyek bersama, menghadiri acara, atau bahkan membentuk komunitas profesional. Kolaborasi ini membuka peluang untuk belajar dari sesama kreator, memperluas jaringan, dan meningkatkan eksposur ke audiens yang lebih luas.

- **Potensi Menjadi Influencer**

Dengan jumlah pengikut yang besar, seorang konten kreator dapat menjadi *influencer* yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini publik.

Status ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai inisiatif, mulai dari kampanye sosial hingga kerja sama dengan *brand-brand* ternama, yang pada gilirannya meningkatkan peluang karier di berbagai bidang.

Pada akhirnya, apakah konten kreator akan tetap menjadi profesi yang dicari atau hanya fenomena sementara sangat bergantung pada upaya setiap individu untuk terus belajar, berinovasi, dan menjaga integritas dalam berkarya. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan semakin matangnya ekosistem digital, peluang untuk menciptakan karier yang stabil dan berkelanjutan di bidang konten kreator akan semakin terbuka lebar bagi mereka yang berani mengambil risiko dan beradaptasi dengan perubahan.

Melalui komitmen untuk terus mengembangkan diri dan memanfaatkan setiap peluang yang ada, konten kreator memiliki potensi besar untuk tidak hanya menjadi sumber inspirasi dan hiburan, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam dunia digital. Dengan demikian, menjawab pertanyaan “Peluang atau Tren Sesaat?” sebenarnya kembali pada kesiapan dan inovasi dari sang kreator sendiri.

Menjadi konten kreator bukan hanya soal membuat video atau postingan, tetapi juga mengelola bisnis secara profesional. Dengan memahami cara bisnis konten kreator, Anda bisa membangun *personal branding*, memperluas audiens, serta menghasilkan pendapatan dari berbagai sumber. Langkah-langkah seperti menentukan *niche*, membuat konten konsisten, menggunakan strategi pemasaran, hingga monetisasi, semuanya adalah bagian dari perjalanan panjang. Tantangan memang ada, tetapi peluang yang ditawarkan jauh lebih besar.



# Perencanaan Pensiun dengan Instrumen Investasi yang Tepat

**Idealnya, masa pensiun menjadi momen untuk menikmati hasil kerja keras di usia muda dengan tenang dan sejahtera. Namun, tanpa persiapan keuangan yang matang dan terencana, masa pensiun justru bisa menjadi beban finansial. Karena itu, penting untuk mulai merancang investasi masa depan sejak dini.**

**M**asa pensiun adalah tahapan kehidupan yang penting dan harus direncanakan dengan baik. Merencanakan pensiun bukan hanya tentang menyimpan uang, tetapi juga tentang berinvestasi secara bijak. Investasi yang tepat dapat membantu mengumpulkan dana yang cukup untuk masa pensiun, sekaligus memastikan bahwa nilai uang tidak tergerus oleh inflasi.

Oleh karena itu, memahami berbagai instrumen investasi dan memilih yang terbaik sesuai dengan kebutuhan sangatlah penting.

Sebelum memilih instrumen investasi, sangat penting untuk memahami profil risiko. Setiap investasi memiliki risiko, termasuk investasi untuk dana pensiun. Risiko ini bisa berasal dari fluktuasi pasar, inflasi, atau likuiditas aset. Beberapa

orang mungkin lebih nyaman dengan investasi yang konservatif dengan risiko rendah, sementara yang lain mungkin lebih suka investasi dengan potensi pengembalian yang lebih tinggi tapi dengan risiko yang lebih besar. Memahami toleransi risiko akan membantu dalam memilih instrumen investasi yang sesuai.

## Instrumen Investasi untuk Pensiun

**Saham dan Reksa Dana Saham:** Jika memiliki profil risiko yang agresif, saham atau reksa dana saham bisa menjadi pilihan. Saham biasanya menawarkan pengembalian yang lebih tinggi dalam jangka panjang.

**Obligasi dan Reksa Dana Pendapatan Tetap:** Untuk profil risiko yang lebih konservatif, obligasi atau reksa dana pendapatan tetap dapat menjadi pilihan. Instrumen ini menawarkan pengembalian yang lebih stabil dan risiko yang lebih rendah.

**Deposito dan Tabungan Pensiun:** Deposito atau produk tabungan pensiun dari bank adalah pilihan bagi mereka yang mencari keamanan dan pengembalian yang stabil. Produk ini cocok untuk individu dengan profil risiko yang sangat konservatif.

**Properti:** Investasi di properti juga bisa menjadi pilihan untuk pensiun, terutama jika mencari sumber pendapatan pasif seperti sewa.

**Asuransi Jiwa dan Dana Pensiun:** Asuransi jiwa dan dana pensiun juga merupakan bagian penting dalam perencanaan pensiun. Keduanya menawarkan manfaat perlindungan sekaligus pengumpulan dana pensiun.

Setiap tujuan investasi memiliki jangka waktu yang berbeda, sehingga strategi yang digunakan juga harus disesuaikan. Jika masih 20-30 tahun dari masa pensiun, pilih investasi dengan potensi pertumbuhan tinggi, seperti saham atau reksa dana saham. Namun, jika akan pensiun dalam 5-10 tahun ke depan, investasi yang lebih

stabil seperti obligasi, deposito, atau reksa dana pasar uang bisa menjadi pilihan untuk mengurangi risiko.

Salah satu kunci sukses dalam investasi adalah diversifikasi. Jangan menaruh semua uang dalam satu jenis investasi. Dengan diversifikasi, bisa mengurangi risiko dan meningkatkan potensi pengembalian investasi.

Kunci utama untuk sukses menyiapkan dana pensiun adalah konsisten menyeter jumlah dana bulanan secara rutin tanpa bolong.

gaya hidup.

Meski target pensiun kamu sudah jelas, kondisi keuangan dan performa investasi akan berubah dari waktu ke waktu. Evaluasi tahunan penting untuk memastikan setoran bulannya masih cukup atau perlu disesuaikan. Jika pendapatan naik, bisa menambah sedikit setoran agar target lebih mudah terkejar. Sebaliknya, kalau *return* investasi lebih rendah dari ekspektasi, bisa saja mengganti instrumen supaya pertumbuhannya kembali optimal.



Cara paling aman adalah pakai *auto-debit* agar uang langsung masuk ke instrumen pensiun sebelum sempat terpakai. Selain itu, bisa juga memanfaatkan tunjangan atau bonus kerja untuk menambah angka setoran. Secara prinsip, bonus adalah uang dingin, yang jika digunakan untuk dana pensiun tidak akan mempengaruhi

Investasi untuk pensiun adalah proses jangka panjang. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus memantau dan menyesuaikan portofolio investasi. Pasar keuangan dapat berubah, maka perlu menyesuaikan alokasi aset sesuai dengan perubahan kondisi pasar dan kebutuhan.



# OJK Terima Lebih dari 150.000 Layanan di Penutup Tahun 2025

Periode Oktober-Desember 2025, OJK menerima 154.919 layanan konsumen. Layanan tersebut terdiri dari 31.748 permintaan informasi, 104.483 pertanyaan, dan 18.688 pengaduan. Tiga produk teratas yang banyak ditanyakan adalah pertanyaan *fintech*-pinjaman *online* multiguna (penerima dana) sebanyak 22.099 pertanyaan, mengenai transfer dana/RTGS sebanyak 7.863 pertanyaan, dan pembiayaan multiguna-pembayaran angsuran sebanyak 6.168 pertanyaan. Terdapat juga tiga produk teratas yang banyak mendapat pengaduan konsumen, yakni *fintech*-pinjaman *online* multiguna (penerima dana) sebanyak 22.099, pembiayaan multiguna-pembayaran angsuran sebanyak 1.806, dan pengaduan produk pembiayaan lainnya sebanyak 1.674.

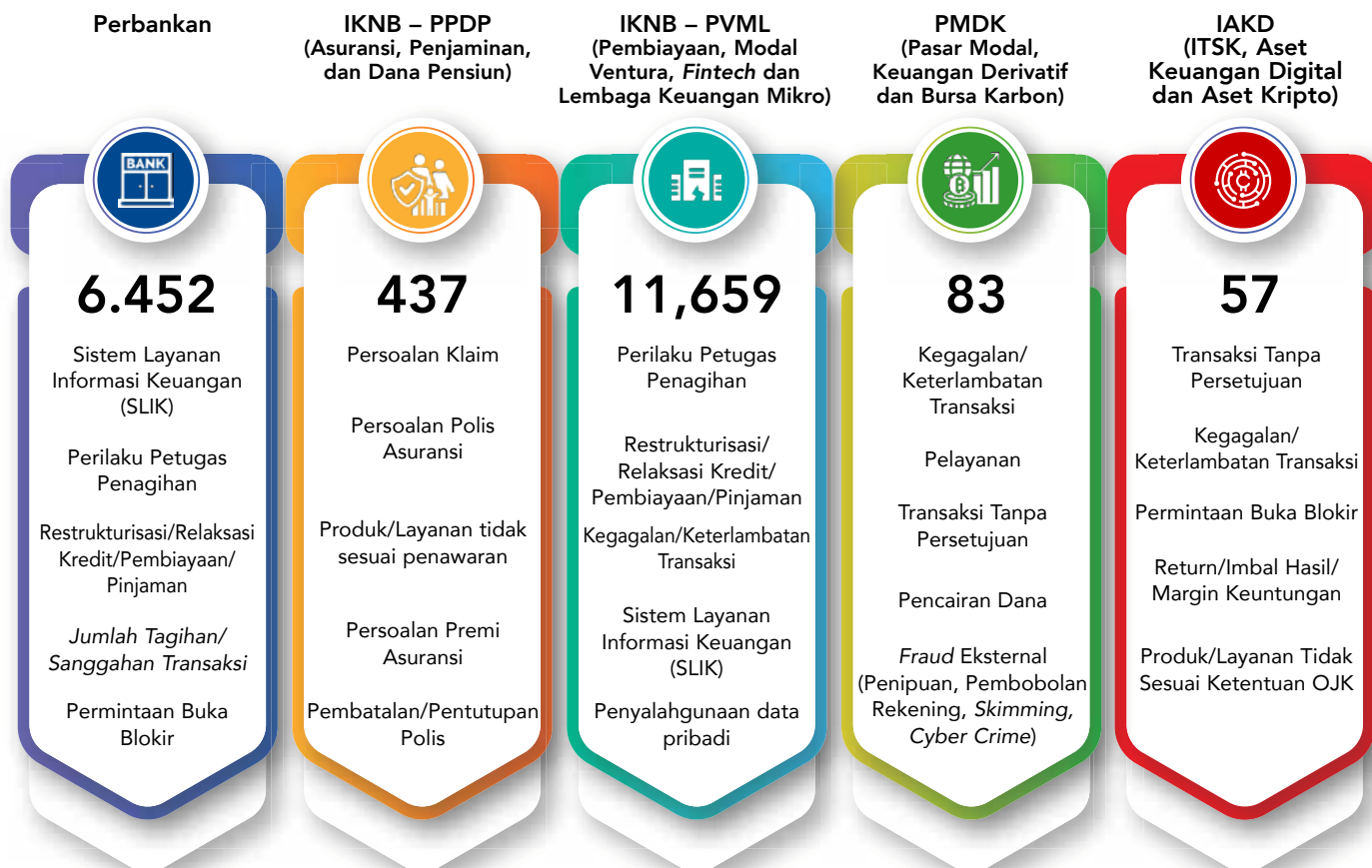
OJK juga mencatat informasi pertanyaan mengenai P2P lending (pinjaman daring). Sdr. A pada tanggal 01 Oktober 2025 menginformasikan sudah menerima hasil SLIK, dan ada tunggakan di PT XX yang masih harus dilunasi, yang bersangkutan (ybs) sudah mencoba menghubungi pihak *customer service* aplikasi tersebut untuk menanyakan user di aplikasinya, karena ybs tidak

ingat akun untuk login ke aplikasi, dan sudah diinformasikan nomor terdaftar oleh pihak *customer service*-nya namun dengan inisial xxx dan ybs masih belum mengetahui xxx yang dimaksud nomor yang mana, karena pihak *customer service*-nya langsung menutup informasi.

Konsumen juga menanyakan terkait saham. Sdr. B pada tanggal 12 November 2025 menanyakan terkait permintaan buka blokir atas investasi di PT XXXX akun milik suami ybs, adapun ybs mendapatkan email pemblokiran tersebut sesuai keputusan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atas permintaan OJK, namun ybs tidak melakukan hal apapun tetapi ada pemblokiran.

Berdasar data di atas, OJK akan terus melakukan tindakan perlindungan konsumen melalui langkah preventif, maupun kuratif. Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) di kontak157. ojk.go.id, Whatsapp 081157157157 dan email konsumen@ojk.go.id. OJK juga akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat pengguna jasa keuangan untuk lebih cermat dan teliti dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Cara ini terus dilakukan agar konsumen di Indonesia terlindungi dengan baik.

## Data Layanan dan Kontak OJK Data Pengaduan Tahun 2025 Periode 1 Oktober – 31 Desember 2025



# Unit Link, Asuransi Jiwa, Reksa Dana Pasar Uang, Mana yang Paling Cocok?

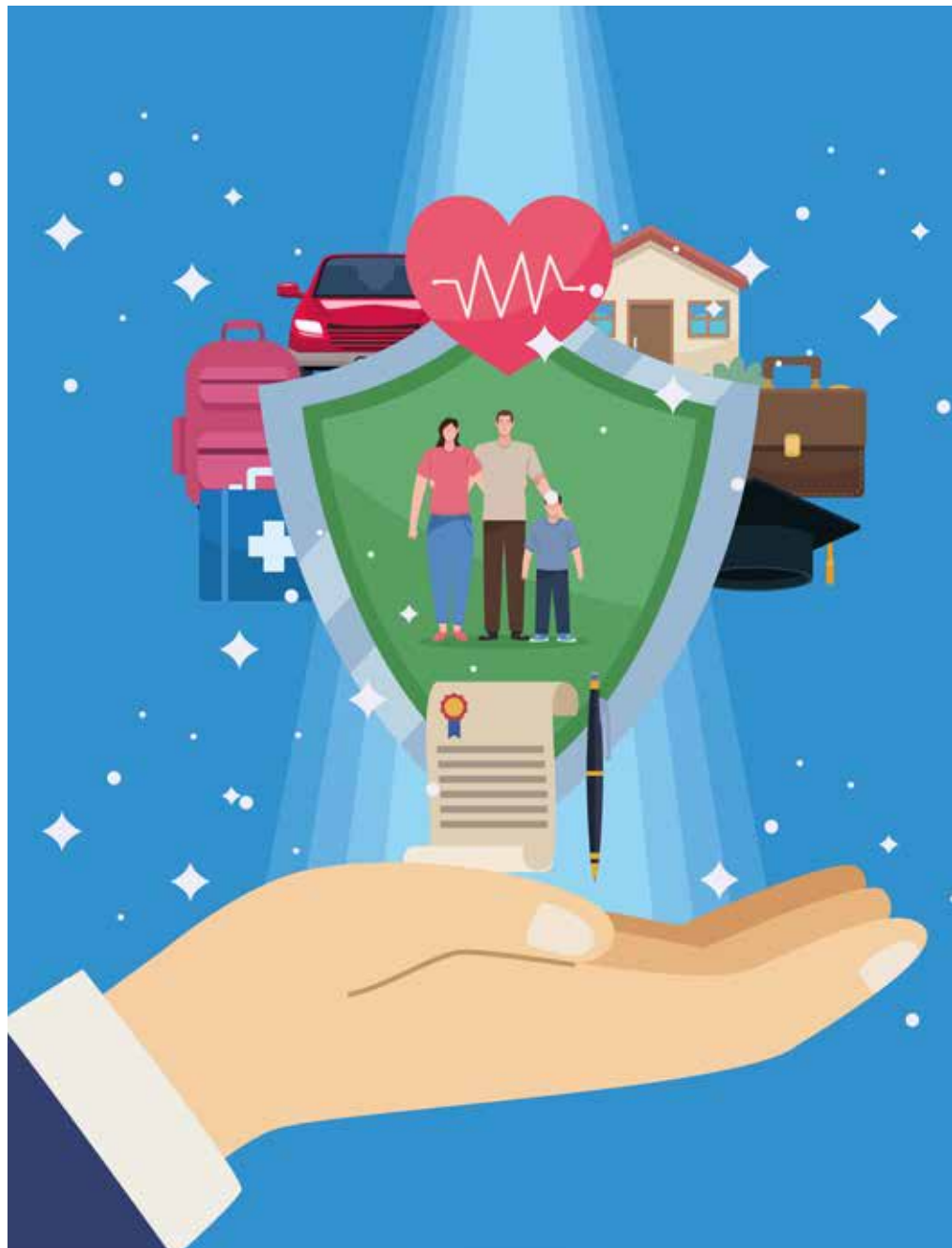
**Banyak masyarakat mengira kalau investasi reksa dana sama saja dengan unit link. Bahkan masih ada yang tertukar pemahaman antara unit link dengan asuransi jiwa tradisional. Padahal ketiganya memiliki perbedaan yang cukup jelas. Lalu bagaimana cara memilihnya?**

**U**nit link, asuransi jiwa, Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) adalah produk keuangan yang memiliki perannya masing-masing. Unit link adalah produk asuransi yang menggabungkan proteksi jiwa dan investasi, sedangkan asuransi jiwa tradisional hanya fokus pada proteksi. Sementara RDPU adalah instrumen investasi murni yang tidak memiliki manfaat proteksi sama sekali. Perbedaan utama ketiganya terletak pada komponen investasi, manfaat, biaya, dan tujuan produk.

Ketiga produk tersebut memiliki manfaat masing-masing pula. Contohnya, manfaat unit link yakni memberikan perlindungan jiwa sekaligus potensi nilai investasi yang dikelola melalui alokasi dana ke berbagai instrumen investasi seperti reksa dana. Manfaat asuransi jiwa tradisional adalah sebagai perlindungan finansial yang

memberikan uang pertanggungan kepada pemilik asuransi dengan premi yang umumnya lebih rendah dibandingkan unit *link*. Sementara

manfaat dari RDPU adalah jaminan pengelolaan mengelola dana investasi yang terus menerus di pasar uang untuk mendapatkan keuntungan.



Seperti keumuman produk keuangan, ketiga produk tersebut selain memiliki manfaat terdapat kekurangannya juga atau dengan kata lain ada risiko yang harus dipertimbangkan sebelum menggunakannya. Pada produk unit link, kita menghadapi risiko nilai investasi yang tidak dijamin dan bisa berfluktuasi tergantung kinerja pasar. Biaya preminya juga lebih mahal dibandingkan asuransi tradisional karena adanya biaya akuisisi dan biaya investasi.

Untuk asuransi jiwa tradisional, nasabah menghadapi risiko ketiadaan komponen investasi yang bisa berkembang, dan nilai tunai tidak terbentuk dari premi yang dibayar. Namun, biaya premi bisa lebih murah karena seluruhnya dialokasikan untuk

biaya asuransi. Dan, RDPU memiliki risiko nilai investasi yang selalu fluktuatif. Meskipun relatif lebih stabil dibandingkan reksa dana saham atau campuran. Menariknya, RDPU tidak ada biaya akuisisi atau biaya asuransi seperti pada unit link.

Jadi, produk mana yang harus dipilih? Sederhana saja, tentukan dahulu apa yang menjadi kebutuhan kita, sebab setiap produk tetap ada kelebihan dan kekurangannya. Dengan memilih sesuai kebutuhan, setidaknya nilai minus atau risiko dari produk yang kita pilih sudah kita pertimbangkan dengan matang dan tahu bagaimana cara menangannya.

Misalnya, kita membutuhkan produk yang bisa memberikan proteksi dan potensi pertumbuhan investasi dalam satu produk. Serta memiliki

fitur “cuti premi” yang memungkinkan polis tetap aktif saat nasabah tidak membayar premi (selama nilai investasi cukup). Itu artinya, kita membutuhkan jenis produk unit link. Lalu, jika kita membutuhkan produk yang biaya preminya stabil dan terjangkau, serta uang pertanggungan yang lebih besar dengan premi yang sama dibandingkan unit link. Maka, pilihlah asuransi jiwa tradisional. Sementara itu, jika yang kita butuhkan adalah kemudahan dan keleluasaan untuk menghentikan investasi atau menambah dana kapan saja tanpa khawatir kehilangan manfaat proteksi, pilihlah jenis produk RDPU.

Untuk lebih jelas perbedaan dari ketiganya, dapat dilihat dalam tampilan tabel berikut.

## PERBEDAAN UNIT LINK, ASURANSI JIWA, DAN RDPU

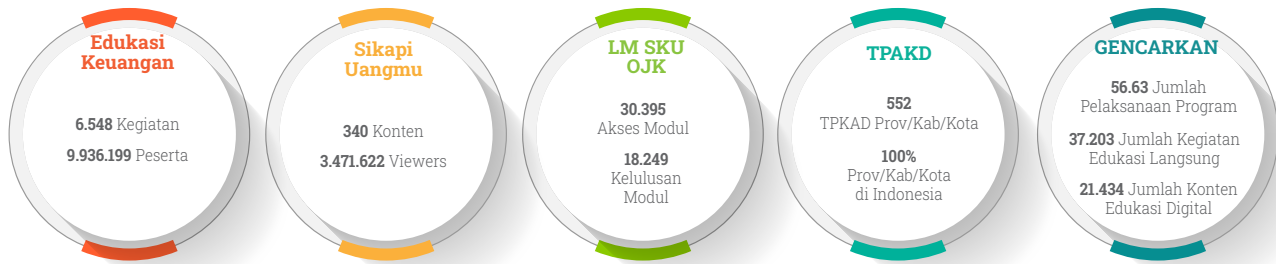
ASPEK	UNIT LINK	ASURANSI JIWA TRADISIONAL	REKSA DANA PASAR UANG
<b>Tujuan</b>	Perlindungan + investasi	Perlindungan terhadap risiko meninggal	Investasi jangka pendek/ likuiditas
<b>Produk Utama</b>	Polis asuransi + dana investasi	Polis asuransi	Instrumen pasar uang (SBN, deposito, deposito antar bank)
<b>Manfaat</b>	Santunan meninggal + potensi imbal hasil	Santunan meninggal	Imbal hasil dari bunga pasar uang
<b>Risiko</b>	Risiko pasar (nilai investasi turun) + risiko asuransi	Risiko terbatas (hanya risiko kematian)	Risiko rendah, tapi imbal hasil rendah
<b>Likuiditas</b>	Rendah–sedang (pencairan sebagian memerlukan prosedur)	Rendah (hanya klaim saat meninggal atau jatuh tempo tertentu)	Tinggi (bisa dicairkan kapan saja)
<b>Biaya</b>	Premi + biaya manajemen investasi + biaya asuransi	Premi asuransi saja	Biaya manajemen rendah, tanpa premi asuransi
<b>Profil Investor</b>	Ingin proteksi + investasi	Fokus proteksi	Ingin aman, likuiditas tinggi, risiko rendah
<b>Periode Investasi</b>	Menengah–panjang	Panjang	Pendek–menengah
<b>Regulasi</b>	Diawasi OJK	Diawasi OJK	Diawasi OJK



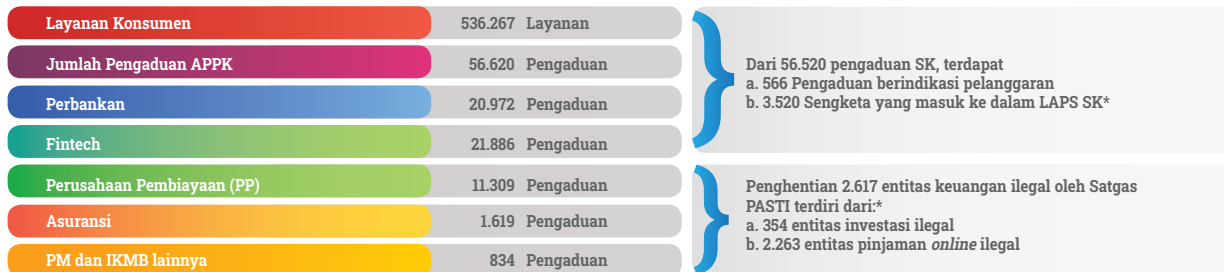
# Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Menghadapi Perekonomian 2026

## Perkembangan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Udukasi, dan Pelindungan Konsumen

### Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Udukasi, dan Pelindungan Konsumen Literasi dan Inklusi Keuangan (ytd 31 Desember 2025)



### Pelindungan Konsumen dan Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (ytd 28 Desember 2025)

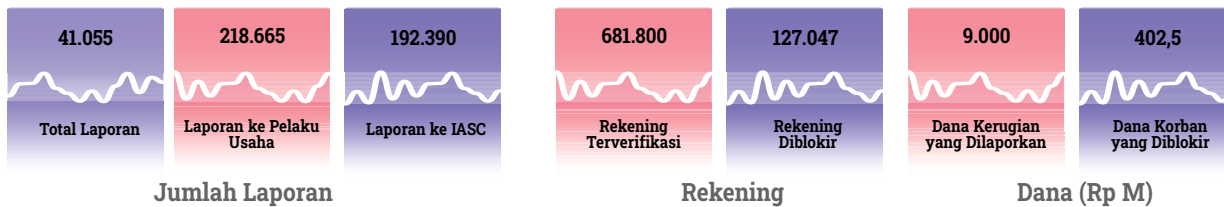


#### Penyelesaian Pengaduan

96,50% Terselesaikan penanganannya melalui internal dispute resolution PUJK  
3,50% Sedang dalam, proses penyelesaian



### Indonesia Anti Scam Centre (November 2024 s.d 28 Desember 2025)



Rapat Dewan Komisiner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 24 Desember 2025 silam, menilai stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) tetap terjaga. Hal ini tercermin antara lain dari kredit yang tumbuh sebesar 7,74% yoy menjadi Rp8.314,48 triliun. Selain itu, penghimpunan dana di Pasar Modal hingga 31 Desember 2025 mencapai 274,80 triliun dengan total jumlah investor mencapai 20,36 juta.

Di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, per November 2025 aset industri asuransi mencapai Rp1.194,06 triliun atau naik 5,96% yoy. Aset dana pensiun tumbuh 10,72% yoy dengan nilai mencapai

R1.662,16 triliun. Serta aset perusahaan penjaminan tumbuh 2,03% yoy menjadi Rp47,63 triliun.

Ketahanan perbankan juga tetap kuat tercermin dari permodalan (CAR) yang berada di level tinggi sebesar 26,05%, sehingga dapat menjadi bantalan mitigasi risiko yang cukup kuat untuk mengantisipasi ketidakpastian kondisi global.

Sementara, perkembangan aktivitas aset kripto di Indonesia, nilai transaksi selama bulan Desember 2025 tercatat Rp32,68 triliun yang menjadi indikasi bahwa kepercayaan konsumen dan kondisi pasar tetap terjaga baik.

# Pergadaian sebagai Alternatif Pembiayaan UMKM

Banyak UMKM kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional seperti bank karena keterbatasan jaminan, kurangnya riwayat kredit, atau proses administrasi yang rumit. Dalam situasi seperti ini, Pergadaian hadir sebagai solusi yang lebih inklusif dan mudah diakses.

**M**emulai dan mengembangkan usaha bukanlah perkara mudah, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sering kali menghadapi kendala dalam hal permodalan. Di Indonesia, sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian, menyumbang sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Namun, ironisnya, akses terhadap pembiayaan masih menjadi tantangan terbesar yang menghambat pertumbuhan bisnis mereka.

Berbeda dengan bank yang biasanya mensyaratkan agunan dalam bentuk sertifikat tanah atau bangunan, pergadaian menerima berbagai barang berharga sebagai jaminan, seperti emas, kendaraan bermotor, alat elektronik, hingga surat berharga. Dengan mekanisme ini, pelaku UMKM dapat lebih mudah mendapatkan modal tanpa perlu menghadapi persyaratan yang kompleks.



Salah satu keistimewaan pergadaian adalah proses pencairan dana yang cepat. Hal ini sangat membantu pelaku usaha yang membutuhkan modal mendesak untuk keperluan operasional atau menghadapi peluang bisnis yang datang secara tiba-tiba. Selain itu, tenor pinjaman yang fleksibel memungkinkan UMKM mengelola pembayaran cicilan sesuai dengan kemampuan finansial mereka.

Pergadaian juga menawarkan berbagai skema pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan UMKM, mulai dari pinjaman berbasis konvensional hingga skema berbasis syariah yang lebih transparan dan bebas riba. Hal ini memberikan pilihan yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk memilih produk pembiayaan yang paling sesuai dengan prinsip dan kebutuhan mereka.

Salah satu perusahaan yang menawarkan jasa pergadaian bagi UMKM adalah PT Pegadaian. Pembiayaan yang ditawarkan PT Pegadaian dapat memenuhi kebutuhan modal kerja, dengan ketentuan dan proses yang disesuaikan dengan karakteristik layanan pembiayaan non-bank.

### Pinjaman Modal

PT Pegadaian meluncurkan produk Pinjaman Modal Produktif untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Melalui produk ini, masyarakat pelaku UMKM yang ingin mendapatkan pinjaman modal usaha dapat mengajukan pinjaman mulai dari Rp10 juta hingga

Rp2 miliar dengan jaminan surat penagihan hutang (*invoice*).

Untuk bisa menggunakan produk ini, nasabah perlu melampirkan *copy invoice* sebagai agunan tanpa perlu menjaminkan aset secara fisik. Prosesnya pun mudah dan cepat karena dilakukan secara *online* melalui [digilend.pegadaian.co.id](http://digilend.pegadaian.co.id).

Calon nasabah yang hendak memperoleh pinjaman modal usaha dapat langsung melakukan registrasi, kemudian menggugah dokumen yang diperlukan secara lengkap, seperti dokumen identitas, keterangan usaha, *copy invoice*, dokumen keuangan, serta berbagai dokumen yang dibutuhkan lainnya.

Setelah seluruh dokumen-dokumen tersebut diunggah, calon nasabah akan langsung dihubungi oleh tim dari PT Pegadaian. Di samping itu, sebelum mengajukan pinjaman, calon nasabah dapat melakukan simulasi dengan mengisi nilai *invoice*, jangka waktu peminjaman, dan memasukkan tanggal jatuh tempo *invoice* yang dimiliki.

Adapun syarat utama yang wajib dipenuhi oleh peminjam diantaranya harus Warga Negara Indonesia, memiliki badan usaha yang berbentuk PT, CV, atau Perum yang terdaftar di Indonesia, telah berdiri minimal selama dua tahun, dan penjualan tahunan minimal Rp2,5 miliar.

Sementara itu, untuk proses peminjaman dengan nilai sampai dengan Rp1 miliar, membutuhkan waktu 3 (tiga) hari kerja dan 7 (tujuh) hari kerja untuk pinjaman lebih dari Rp 1 miliar, setelah seluruh dokumen dilengkapi. Tarif sewa modal relatif

terjangkau mulai dari 0,04% per hari dengan jangka waktu pinjaman mulai dari 15 hari sampai 6 bulan.

### KUR Syariah

KUR Syariah Pegadaian adalah program pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM yang belum *bankable*. Pinjaman ini menggunakan akad *Rahn* (gadai syariah) sehingga bebas bunga. Sebagai gantinya, nasabah hanya dikenakan biaya pemeliharaan (*Mu'nah*). Produk ini hadir untuk membantu UMKM mengembangkan usaha dengan cara yang halal, aman, dan mudah diakses.

Untuk mengajukan pinjaman, siapkan dokumen berikut:

- Fotokopi e-KTP yang sudah terdaftar
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- Fotokopi Buku Nikah (bagi yang sudah menikah)
- Surat Keterangan Domisili (jika alamat berbeda dengan KTP)
- Bukti kepemilikan rumah (PBB, SHM/SHGB)
- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau izin usaha (IUMK, SIUP, SKU)
- Fotokopi rekening listrik/PDAM/telepon

KUR Syariah Pegadaian adalah solusi pembiayaan halal untuk UMKM yang ingin mengembangkan usaha tanpa terbebani bunga. Dengan syarat yang mudah, biaya rendah, dan layanan terpercaya dari PT Pegadaian, program ini bisa menjadi pilihan tepat bagi UMKM yang ingin membesarkan bisnis dengan cara yang lebih berkah.



## Diskon Akhir Tahun Selalu Menguntungkan, Benarkah?

Banyak yang tak sadar bahwa strategi marketing di balik potongan harga sering membuat pembeli justru belanja lebih banyak dari yang dibutuhkan. Ada juga “diskon palsu”, di mana harga dinaikkan dulu sebelum diturunkan kembali. Di sisi lain, beberapa promo memang benar-benar bisa membantu konsumen berhemat. Lalu, bagaimana sebaiknya konsumen menyikapi fenomena diskon besar di akhir tahun?

**M**emasuki kuartal keempat tahun 2025, Indonesia kembali dihadapkan dengan fenomena tahunan yang menjadi sorotan ekonomi: diskon akhir tahun besar-besaran. Momentum ini dimulai dengan rangkaian program yang dimulai sejak September 2025 melalui “Road to Harbolnas” dan mencapai puncaknya pada beberapa peristiwa belanja utama, Harbolnas 10-16 Desember, diikuti dengan

11.11 (25 November), *Black Friday* (28 November), *Cyber Monday* (1 Desember), dan 12.12 *Birthday Sale*.

Fenomena ini jelas menguntungkan roda perekonomian Indonesia. Transaksi yang berjalan mencapai Rp35 triliun dengan ambisi memperkuat kontribusi produk lokal hingga 50%. Namun, bagaimana imbas bagi konsumen terkait fenomena diskon akhir tahun? Apakah diskon akhir tahun 2025 benar-benar dapat meningkatkan

daya beli dan konsumsi masyarakat secara berkelanjutan, atau sekadar menciptakan illusi penghematan yang mendorong perilaku konsumsi impulsif?

Diskon akhir tahun memang disebut-sebut dapat meningkatkan konsumsi tetapi tidak selalu meningkatkan daya beli. Paradoks fundamental yang terjadi terkait diskon akhir tahun meliputi beberapa faktor yakni, pertama, peningkatan



frekuensi tetapi penurunan nilai per transaksi. Volume penjualan meningkat, namun nilai per transaksi menurun, terutama pada segmen menengah ke bawah. Kedua, substitusi pengeluaran ketimbang ekspansi. Mayoritas konsumen kelas menengah ke bawah menggunakan momentum diskon untuk melakukan substitusi pengeluaran, memindahkan pembelian yang akan dilakukan di periode lain, ketimbang menambah total pengeluaran mereka. Dengan demikian, diskon menciptakan konsentrasi transaksi pada periode tertentu, bukan ekspansi ekonomi riil.

Ketiga, stimulasi *impulse buying* dan peningkatan beban hutang. Diskon akhir tahun mendorong perilaku *impulse buying* yang difasilitasi oleh layanan *paylater*. Sementara ini meningkatkan volume transaksi jangka pendek, fenomena ini menciptakan beban hutang baru untuk konsumen menjelang 2026, berpotensi menurunkan daya beli di kuartal-kuartal mendatang. Keempat, dampak heterogen terhadap berbagai segmen. Program diskon tidak berdampak sama terhadap semua segmen. Kelompok menengah atas merespons dengan peningkatan kepercayaan dan optimisme, sedangkan kelompok menengah ke bawah lebih berhati-hati dan lebih fokus pada kebutuhan primer. Dengan demikian, diskon akhir tahun cenderung memperkuat ketimpangan daya beli antar kelas.

Kelima, efektivitas dalam konteks target pertumbuhan ekonomi. Meskipun diskon akhir tahun tidak secara fundamental meningkatkan daya beli masyarakat secara



berkelanjutan, program ini tetap memberikan dampak positif dalam jangka pendek terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal keempat 2025.

Untuk itu, sebagai konsumen yang bijak, dalam menyikapi fenomena diskon besar akhir tahun yang selalu berulang dengan kehati-hatian. Maksudnya, antusiasme tinggi untuk berbelanja sebaiknya diimbangi dengan sikap kritis agar tidak terjebak promosi palsu atau "diskon abal-abal". Pastikan, kita sudah mengetahui harga pasaran barang yang hendak kita beli. Bandingkan dengan harga diskonnya. Periksa juga kualitas barang, sebab barang yang umumnya didiskon adalah stok gudang yang sudah terlalu lama menumpuk dan belum terjual. Tetap fokus pada prioritas kita, jangan

membeli barang diluar kebutuhan.

Latihlah diri kita sendiri dari jebakan perilaku *impulsive buying* yakni perilaku membeli sesuatu secara spontan tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau kemampuan finansial. Biasanya, penyebab *impulsive buying* bisa beragam, di antaranya karena godaan promosi seperti diskon besar, gratis ongkir, atau *cashback*. Lalu, adanya tekanan waktu, misalnya pembeli diberi penawaran terbatas (*limited time offer*). Berikutnya, karena tren *Fear of Missing Out* (FOMO) yakni takut melewatkan kesempatan yang ada. Dan terakhir, karena terdorong oleh daya tarik visual produk.

## Buku Saku Literasi Keuangan bagi PMI dan Keluarga

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki kontribusi yang sangat strategis dalam menopang perekonomian nasional. Remitansi yang dikirimkan oleh para PMI tidak hanya berdampak pada ekonomi rumah tangga, tetapi juga turut memperkuat devisa negara. Buku Saku Literasi Keuangan bagi PMI dan Keluarga merupakan langkah konkret OJK untuk meningkatkan kemampuan finansial PMI di era digital.

**P**MI sebagai ujung tombak perekonomian keluarga, literasi keuangan yang memadai dan perlindungan konsumen yang efektif tentu saja harus menjadi prioritas. Literasi keuangan bagi PMI tidak hanya penting untuk meningkatkan kesejahteraan PMI selama bekerja di luar negeri, tetapi juga krusial untuk mempersiapkan masa depan mereka dan keluarga di tanah air.

Namun di balik kontribusi besar tersebut, para pekerja migran menghadapi beragam tantangan yang tidak ringan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan serta kerentanan terhadap penipuan keuangan. Akibatnya, hasil jerih payah yang diperoleh selama bekerja di luar negeri sering kali tidak mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga maupun rencana masa depan PMI. Hal ini diperparah dengan keterbatasan akses PMI terhadap informasi dan materi pengelolaan keuangan yang relevan, sederhana, dan aplikatif.

Buku ini terdiri dari 11 bab yang disusun sebagai panduan praktis dan aplikatif yang dapat membantu para PMI dalam memahami prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan. Menggunakan bahasa sederhana, buku ini memuat petunjuk pengelolaan keuangan, pengenalan produk tabungan, sistem pembayaran, remitansi dan penukaran valuta asing, KUR bagi PMI, asuransi dan jaminan sosial, investasi di pasar modal, infrastruktur literasi keuangan, cerdas bertransaksi keuangan digital, cerdas bertransaksi tunai, serta perlindungan PMI dan layanan konsumen.

Lebih dari sekadar alat bantu teknis, buku ini diharapkan dapat menjadi media pemberdayaan—memberikan rasa percaya diri kepada para PMI untuk mengambil keputusan keuangan secara mandiri dan baik, serta menjadi konsumen keuangan yang cerdas dan terlindungi. Dalam jangka panjang, kemampuan ini akan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, meningkatkan produktivitas remitansi, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Buku Saku Literasi Keuangan bagi PMI dan Keluarga dapat diunduh secara gratis di [sikapiuangmu.ojk.go.id](https://sikapiuangmu.ojk.go.id).





## Temukan Buku Literasi Keuangan

Bantulah Bagus dari Keluarga Sikapi menemukan empat buku saku OJK yang terselip dalam rak lemari.



Temukan empat buku saku OJK yang terselip dalam rak lemari, jawablah dengan tepat, kirim jawaban melalui DM @Sikapiuangmu dan unggah melalui Instagram Story (mention @Sikapiuangmu).

Dapatkan hadiah menarik bagi 3 orang pemenang kuis!

# Hari Oeang Republik Indonesia ke-79, Rupiah Kawal Asta Cita

Kira-kira ada yang tahu tidak setiap tanggal 30 Oktober kita memperingati hari apa? Betul, Hari Oeang Republik Indonesia. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang lahirnya mata uang pertama RI yang menjadi simbol kedaulatan bangsa di bidang ekonomi.



Oeang Republik Indonesia (ORI) menjadi alat pembayaran sah pertama yang dikeluarkan pemerintah Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Penerbitan ORI dilakukan untuk menggantikan mata uang asing yang masih beredar, seperti gulden Belanda dan uang pendudukan Jepang.

Kehadiran ORI menandai langkah besar bangsa Indonesia dalam memperkuat kedaulatan ekonomi setelah kemerdekaan, sekaligus menjadi simbol persatuan dan kepercayaan terhadap pemerintahan Republik.

Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) diperingati setiap tahunnya sebagai salah satu cara memaknai perjuangan para pendahulu dalam membangun sistem keuangan negara yang berdaulat. Selain itu juga sebagai pengingat pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, serta dedikasi dalam mengelola keuangan negara untuk kemakmuran rakyat.

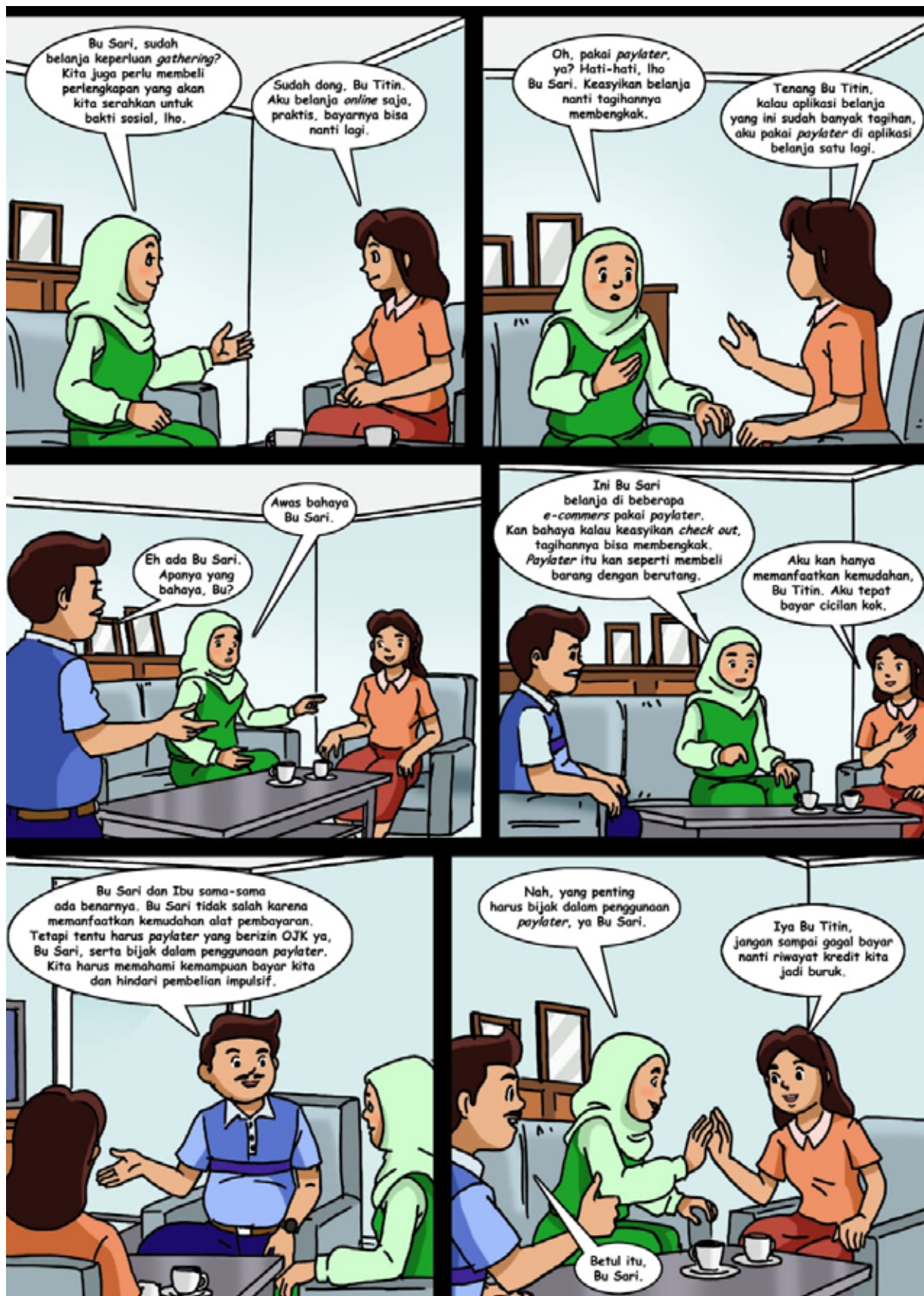
Penerbitan ORI pada awal masa kemerdekaan menghadapi berbagai tantangan, termasuk kondisi keamanan yang memburuk, inflasi tinggi, dan kebutuhan untuk membangun kepercayaan publik. Namun, setelah kedaulatan Indonesia diakui, ORI akhirnya digantikan oleh rupiah melalui Undang-Undang Mata Uang tahun 1951.

Kini, setelah berusia 79 tahun, peringatan HORI diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk lebih memahami peran uang dalam kehidupan sehari-hari dengan pengelolaan keuangan yang baik dan dalam pembangunan ekonomi nasional.

Mari, kita bela negeri ini meski tanpa senjata. Caranya dengan menjaga dan merawat rupiah kita. Gunakan dengan bijaksana untuk kemajuan ekonomi bangsa.



## Bijak Menggunakan *Paylater*





# Selamat Tahun Baru

1 Januari 2026

# 2026

Menutup tahun dengan refleksi,  
membuka tahun dengan harapan  
dan perencanaan keuangan yang  
lebih baik.